

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan pelayanan KDH/KWDH, sarana prasarana gedung kantor dan sarana Administrasi Perkantoran
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Sebab	Dampak					
1	Risiko Strategis Sekretariat Daerah								
1	Belum terakomodirnya keperluan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Banyaknya kebutuhan KDH/WKDH/Sekretariat yang harus disediakan	Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran kebutuhan KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
2	Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Keterbatasan anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran kebutuhan KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
3	Belum terpenuhinya output kegiatan dengan renja OPD	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Usulan pada renja baru berdasarkan keinginan	Terlambatnya pencairan dana untuk kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Evaluasi data kebutuhan rumah tangga di renja OPD dengan anggaran yang tersedia serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
4	Belum terakomodirnya data sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Banyaknya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang harus disediakan	Terhambatnya pelaksanaan perbaikan gedung kantor	Evaluasi data sarana prasarana dan anggaran yang tersedia serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
5	Tidak terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Keterbatasan anggaran dan banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang layak	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Membuat telaahan staf terkait sarana dan prasarana gedung kantor serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
	Masalah/Risiko Baru:								
III	Risiko Operasional								
1	Belum terakomodirnya data kunjungan tamu sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Banyaknya acara/kegiatan kantor di luar perencanaan awal	Tidak terpenuhinya makan minum KDH, WKDH, rapat dan kunjungan tamu pemerintah daerah	Evaluasi data dan anggaran fasilitas tamu yang tersedia serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
2	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Kegiatan/ acara pemerintah daerah tidak dapat diperkirakan jumlah dan waktunya	Akan berdampak pada nama baik pemerintah daerah	Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran fasilitas tamu	Triwulan I s/d IV tahun 2023	Triwulan I s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
						Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan serta ajukan dan stakeholders terkait adanya kunjungan tamu	Triwulan I s/d IV tahun 2023	Triwulan I s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan

3	Belum optimalnya SOP terkait pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Belum tersosialisasinya SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas secara menyeluruh	Terhambatnya pemeliharaan kendaraan dinas	Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas secara menyeluruh serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait anggaran	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
4	Tidak tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	ROO.22.99.02	Tahun 2023	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan kendaraan dinas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Membuat telaahan staf terkait kendaraan dinas serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	koordinasi telah dilaksanakan
5	Tidak terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.22.99.02		Tidak sampainya informasi undangan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tidak meningkatnya kompetensi ASN Sekretariat Daerah	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholders/ instansi pelaksana terkait pendidikan dan pelatihan pegawai	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
	Masalah/Risiko Baru:								

CANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Penilaian : 2023

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KDH/KWDH , sarana prasarana gedung kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Berkordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran kebutuhan KDH/KWDH/Sekretariat Daerah	Konfirmasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
2	Evaluasi data kebutuhan rumah tangga di renja OPD dengan anggaran yang tersedia serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Konfirmasi, evaluasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
3	Evaluasi data sarana prasarana dan anggaran yang tersedia serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Konfirmasi, evaluasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
4	Membuat telaahan staf terkait sarana dan prasarana gedung kantor serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Hasil Telaahan staf, Konfirmasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
5	Evaluasi data dan anggaran fasilitas tamu yang tersedia serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Konfirmasi, evaluasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
6	Berkordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran fasilitas tamu	Konfirmasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan I s/d IV tahun 2023	Triwulan I s/d IV tahun 2023	
7	Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Protokol dan komunikasi pimpin serta ajudan dan stakeholders terkait adanya kunjungan tamu	Konfirmasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan I s/d IV tahun 2023	Triwulan I s/d IV tahun 2023	

8	Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas secara menyeluruh serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait anggaran	Laporan Sosialisasi, Konfirmasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023
9	Membuat telaahan staf terkait kendaraan dinas serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Hasil Telaahan staf, Konfirmasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023
10	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholders/ instansi pelaksana terkait pendidikan dan pelatihan pegawai	Konfirmasi dan koordinasi	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawain	Triwulan II s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2022

: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KDH/KWDH, sarana prasarana gedung kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Nama Pemda
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran kebutuhan KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
2	Evaluasi data kebutuhan rumah tangga di renja OPD dengan anggaran yang tersedia serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
3	Evaluasi data sarana prasarana dan anggaran yang tersedia serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
4	Membuat telaahan staf terkait sarana dan prasarana gedung kantor serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	
5	Evaluasi data dan anggaran fasilitas tamu yang tersedia serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan I s/d IV tahun 2023	Triwulan I s/d IV tahun 2023	
6	Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran fasilitas tamu	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan I s/d IV tahun 2023	Triwulan I s/d IV tahun 2023	
7	Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan serta ajudan dan stakeholders terkait adanya kunjungan tamu	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023	

8	Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan kendaraan di secara menyeluruh serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait anggaran	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023
9	Membuat telaahan staf terkait kendaraan dinas serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023
10	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholders/ instansi pelaksana terkait pendidikan dan pelatihan pegawai	Rapat/ Koordinasi Langsung	Bagian Umum	Bagian Keuangan	Triwulan III s/d IV tahun 2023	Triwulan III s/d IV tahun 2023

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023					
Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KDH/KWDH , sarana prasarana gedung kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran					
: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Daerah						
1	Belum terakomodirnya keperluan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Membuat telaahan staf untuk penambah anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah	Belum tersedianya anggaran untuk penambahan penyediaan kebutuhan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah	Berkordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran kebutuhan KDHWKDH/Sekretariat Daerah	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan III s/d IV tahun 2023
2	Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah	ROO.22.99.02	Membuat telaahan staf untuk penambah anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah	Belum tersedianya anggaran untuk penambahan penyediaan kebutuhan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah dan RKA Perubahan	Berkordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran kebutuhan KDHWKDH/Sekretariat Daerah	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan III s/d IV tahun 2023
3	Belum terpenuhinya output kegiatan dengan renja OPD	ROO.22.99.02	Melakukan evaluasi penyesuaian penyediaan kebutuhan dengan renja OPD	Keterbatasan anggaran yang tersedia	Evaluasi data kebutuhan rumah tangga di renja OPD dengan anggaran yang tersedia serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan III s/d IV tahun 2023
4	Belum terakomodirnya data sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Melakukan evaluasi terkait data sarana dan prasarana	Keterbatasan anggaran yang tersedia	Evaluasi data sarana prasarana dan anggaran yang tersedia serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023
5	Tidak terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	ROO.22.99.02	Membuat telaahan staf untuk sarana dan prasarana gedung kantor	Keterbatasan anggaran dan banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang layak	Membuat telaahan staf terkait sarana dan prasarana gedung kantor serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023
II	Risiko Operasional OPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah						
1	Belum terakomodirnya data kunjungan tamu sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Membuat telaahan penyesuaian dan penambahan anggaran makan dan minum tamu	Keterbatasan anggaran yang tersedia	Evaluasi data dan anggaran fasilitas tamu yang tersedia serta Berkordinasi dengan Bagian Keuangan	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan III s/d IV tahun 2023
2	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.22.99.02	Membuat telaahan staf untuk penambahan anggaran fasilitas tamu	Belum tersedianya anggaran untuk penambahan penyediaan makan dan minum tamu	Berkordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penambahan anggaran fasilitas tamu	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan I s/d IV tahun 2023
		ROO.22.99.02	Berkordinasi dengan Bagian protokol dan komunikasi pimpinan serta ajudan KDHWKDH dan stakeholders terkait terkait kunjungan Tamu	Banyaknya jumlah tamu di luar perkarua mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan	Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan serta ajudan dan stakeholders terkait adanya kunjungan tamu	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Triwulan I s/d IV tahun 2023

3.	Belum optimalnya SOP terkait pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.22.99.02	Adanya SOP tentang sarana dan prasarana gedung kantor	Belum tersosialisasinya SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas secara menyeluruh serta keterbatasan anggaran yang tersedia	Sosialisasi terkait SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas secara menyeluruh serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait anggaran	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023
4	Tidak tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	ROO.22.99.02	Membuat telaahan staf untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan kendaraan dinas	Membuat telaahan staf terkait kendaraan dinas serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Triwulan III s/d IV tahun 2023
5	Tidak terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.22.99.02	Mencari informasi terkait pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tidak sampainya informasi untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholders/ instansi pelaksana terkait pendidikan dan pelatihan pegawai	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Triwulan III s/d IV tahun 2023

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

: Kabupaten Lima Puluh Kota
: 2023
: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KDH/WKDH, sarana prasarana gedung kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Risiko Prioritas		Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Urusan Pemerintahan		b		c	e	f	g
No	a	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah		d			
1	Belum terakomodirnya keperluan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Banyaknya kebutuhan KDH/WKDH/Sekretariat yang harus disediakan	Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	
2	Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Keterbatasan anggaran	Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	
3	Belum terpenuhinya output kegiatan dengan renja OPD	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Usulan pada renja baru berdasarkan keinginan	Terlambatnya pencairan dana untuk kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	
4	Belum terakomodirnya data sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang harus disediakan	Terhambatnya pelaksanaan perbaikan gedung kantor	
5	Tidak terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Keterbatasan anggaran dan banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang layak	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	
II Risiko Operasional OPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah							
1	Belum terakomodirnya data kunjungan tamu sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Banyaknya acara/kegiatan kantor di luar perencanaan awal	Tidak terpenuhinya makan minum KDh, WKDH, rapat dan kunjungan tamu pemerintah daerah	
2	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Kegiatan/ acara pemerintah daerah tidak dapat diperkirakan jumlah dan waktunya	Akan berdampak pada nama baik pemerintah daerah	
3	Belum optimalnya SOP terkait pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Belum tersosialisasinya SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas secara menyeluruh	Terhambatnya pemeliharaan kendaraan dinas	

4	Tidak tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perencanaan	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan kendaraan dinas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
5	Tidak terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Tidak sampainya informasi undangan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tidak meningkatnya kompetensi ASN Sekretariat Daerah

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota		
Tahun Penilaian	2023		
Periode yang dinilai	2021-2026		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026		
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi dan pemerintahan otonomi daerah yang berkualitas		
Sasaran Strategis	1	Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien	
IKU Renstra OPD	1	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	
Informasi lain		100%	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi dan pemerintahan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis :</p> <p>1 Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien</p> <p>IKU Strategis :</p> <p>1 Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik</p>		
		<p>4 Sarilamak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>3 WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota		
Tahun Penilaian	2023		
Periode yang dinilai	2023		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026		
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi dan pemerintahan otonomi daerah yang berkualitas		
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Persentase terpenuhinya makan minum KDH dan WKDH, rapat, dan kunjungan kerja tamu Pemerintah Daerah	90%
	2	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	88 unit
	3	Jumlah terikutinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN Sekretariat Daerah	6 kegiatan
Informasi Lain			
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		
			<p>Sarilamak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	C/UC	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan :									
	Mewujudkan koordinasi dan pemerintahan otonomi daerah yang berkualitas									
	Sasaran :									
1	Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien									
	Program :									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Belum terakomodirnya keperluan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Banyaknya kebutuhan KDH/WKDH/Sekretariat Daerah yang harus disediakan	internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Kepala Daerah, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Rumah Tangga
			Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Keterbatasan anggaran	eksternal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Kepala Daerah, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Rumah Tangga
			Belum terpenuhinya output kegiatan dengan renja OPD	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Usulan pada renja baru berdasarkan keinginan	Internal	C	Terlambatnya pencairan dana untuk kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH/Sekretariat Daerah	Kepala Daerah, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Rumah Tangga
			Belum terakomodirnya data sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang harus disediakan	internal	C	Terhambatnya pelaksanaan perbaikan gedung kantor	Kepala Daerah, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan
			Tidak terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Keterbatasan anggaran dan banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang layak	internal/ eksternal	C/UC	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Kepala Daerah, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KDH/KWDH, sarana prasarana gedung kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KDH/KWDH, sarana prasarana gedung kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran
 Urusan Pemerintahan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Administrasi Perkantoran
 : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Indikator Keluaran					Risiko			Sebab*		C/UC	Uraian	Dampak**)
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Sumber					
a	b	c			d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Perencanaan	Belum terakomodirnya data kunjungan tamu sesuai kebutuhan	ROO.22.99.03	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Banyaknya acara/kegiatan kantor di luar perencanaan awal	internal/ eksternal	C/UC	Tidak terpenuhinya makan minum KDh, WKDH, rapat dan kunjungan tamu pemerintah daerah	Kepala Daerah, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Rumah Tangga			
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	Pelaksanaan	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.22.99.03	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Kegiatan/ acara pemerintah daerah tidak dapat diperkirakan jumlah dan waktunya	eksternal	UC	Akan berdampak pada nama baik pemerintah daerah	Kepala Daerah, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Rumah Tangga			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi kepegawaian daerah	Pelaksanaan	Belum optimalnya SOP terkait pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Belum tersosialisasinya SOP tentang pemeliharaan kendaraan dinas secara menyeluruh	internal	C	Terhambatnya pemeliharaan kendaraan dinas	Pejabat Eselon II, III, IV dan pemakai kendaraan dinas			
			Pelaksanaan	Tidak tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan kendaraan dinas	eksternal	UC	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Pejabat Eselon II, III, IV dan pemakai kendaraan dinas			
			Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Tidak adanya undangan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	eksternal	UC	Tidak meningkatnya kompetensi ASN Sekretariat Daerah	Seluruh ASN Sekretariat Daerah			

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KDHI/KWDH, sarana prasarana gedung kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah				
1	Belum terakomodirnya keperluan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	3	4	12
2	Tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan rumah tangga KDHWKDH/Sekretariat Daerah	ROO.22.99.02	3	4	12
3	Belum terpenuhinya output kegiatan dengan renja OPD	ROO.22.99.02	3	4	12
4	Belum terakomodirnya data sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	3	4	12
5	Tidak terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	ROO.22.99.02	3	4	12
	Risiko Operasional OPD : Bagian Umum Sekretariat Daerah				
1	Belum terakomodirnya data kunjungan tamu sesuai kebutuhan	ROO.22.99.02	3	4	12
2	Tidak optimalnya pelayanan terhadap tamu pemerintah daerah	ROO.22.99.02	3	4	12
3	Belum optimalnya SOP terkait pemeliharaan kendaraan dinas	ROO.22.99.02	3	4	12
4	Tidak tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	ROO.22.99.02	3	4	12
5	Tidak terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	ROO.22.99.02	3	4	12

**CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Peayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Perlu dilinearakan sumber daya manusia yang ada sesuai bidang nya	Melaksanakan pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	
2	Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurang nya operasional	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	
3	Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga kurang efektifnya	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	
Masalah/Risiko Baru:										
II Risiko Strategis Sekretariat Daerah										
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Perlu dilinearakan sumber daya manusia yang ada sesuai bidang nya	Melaksanakan pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	
2	Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurang nya operasional	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	

3	Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga kurang efektifnya informasi yang diterima terkait agenda kegiatan pimpinan	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
	Masalah/Risiko Baru:								
	III Risiko Operasional Dinas Kesehatan								
1	Keterlambatan penyelesaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ROO.22.99.02	Triwulan III 2023	Keterlambatan memahami dan menyepakati indeks yang akan menjadi pedoman penilaian	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu evaluasi	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD	Triwulan II 2023	Triwulan III 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Belum terjadi	Belum terjadi	Belum terjadi	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
	Masalah/Risiko Baru:								

CONTOH
PENINGKATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2023

: Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melaksanakan pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	Rapat / Pelatihan	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ OPD	OPD	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
2	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana	Rapat Banggar	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	OPD	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
3	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Rapat /Koordinasi langsung	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	OPD	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	

CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
No	a	b	c	d	e	f	g
Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan		
1	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keprotokolan	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	
2	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana	Laporan penyaluran dana sarana dan prasarana	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	
3	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Konfirmasi, koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan	

**Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSP.22.99.02	Pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	Pelatihan SDM tidak terlaksana	Melaksanakan pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	Kepala daerah	Triwulan II 2023
2	Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSP.22.99.02	Pengadaan sarana dan prasarana	Tidak tersedia anggaran untuk sarana dan prasarana	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana	Kepala daerah	Triwulan I 2023
3	Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSP.22.99.02	adanya kerjasama antara organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Program kerjasama antara perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Kepala daerah	Triwulan I 2023
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSO.22.99.02	Pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	Pelatihan SDM tidak terlaksana	Melaksanakan pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2023
2	Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSO.22.99.02	Pengadaan sarana dan prasarana	Tidak tersedia anggaran untuk sarana dan prasarana	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023

3	Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSO.22.99.02	adanya kerjasama antara organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Program kerjasama antara perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023
III							
1	Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Keterlambatan penyelesaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ROO.22.99.02	Koordinasi dengan Bagian organisasi	Koordinasi yang dilaksanakan belum optimal	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Bagian Organisasi	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan II 2023
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	Time skedul	Pengumpulan data tidak sesuai dengan time skedul	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan III 2023
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Penetapan indikator	Prosedur pengumpulan data tidak dijalankan	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Triwulan IV 2023

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

: Kabupaten Lima Puluh Kota
: 2023

: Tewujudnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dinamis, profesional dan berkesinambungan

Urusan Pemerintahan		: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak		
a	b	c	d	e	f	g		
I Risiko Strategis								
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSP.22.99.02	9	Kepala Daerah	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Perlu dilinear sumber daya manusia yang ada sesuai bidangnya		
2	Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurangnya operasional	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan		
3	Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSP.22.99.02	9	Kepala Daerah	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga kurang efektifnya informasi yang diterima terkait agenda kegiatan pimpinan	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan		
II Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah								
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Perlu dilinear sumber daya manusia yang ada sesuai bidangnya		
2	Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurangnya operasional	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan		
3	Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga kurang efektifnya informasi yang diterima terkait agenda kegiatan pimpinan	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan		
III Risiko Operasional OPD : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah								

1	Keterlambatan penyelesaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Protoko dan Komunikasi Pimpinan	Keterlambatan memahami SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang akan menjadi pedoman penilaian	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	9	Setda / Bagian Protoko dan Komunikasi Pimpinan	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Terlambatnya pengolahan data
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	9	Setda / Bagian Protoko dan Komunikasi Pimpinan	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Keterlambatan proses pembuatan SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota								
Tahun Penilaian	2023								
Periode yang dinilai	Periode RENSTRA Tahun 2021-2026								
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan								
OPD yang Dinilai	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota								
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026								
Tujuan Strategis	Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas								
IKU Renstra OPD	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien</td> <td>IKU</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia</td> <td></td> <td>9 dok</td> </tr> </table>	1	Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien	IKU	Target	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia		9 dok
1	Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien	IKU	Target						
1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia		9 dok						
Informasi lain	-								
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas								
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien								
IKU Renstra OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia								
Dst									
	<p>Sarilamak Agustus 2023 Sekretariat Daerah</p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos. M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>								

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

<p>Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Usulan Pemerintahan OPD yang Dinilai</p>	<p>Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 Periode RENSTRA Tahun 2021-2026 Penunjang Urusan Pemerintahan</p>
<p>Sumber Data</p>	<p>Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota RENJA 2023</p>
<p>Tujuan Strategis</p>	<p>Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas</p>
<p>Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama Keluaran/Hasil Kegiatan</p>	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
<p>Informasi Lain</p>	<p>1. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah 100%</p>
<p>Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p>
	<p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>
	<p>Sub Kegiatan</p>
	<p>1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD</p>
	<p>4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>
	<p>Sarijimak, Agustus 2023 Sekretariat Daerah</p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si NIP. 19840404 198803 1 017</p>

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		Kabupaten Lima Puluh Kota Sekretariat Daerah 2023 Periode RENSTRA Tahun 2021-2026 Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkualitas Penunjang Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja		Risiko		Sebab		Dampak		Pihak yang Terkena
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k			
1	Tujuan : Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas Sasaran Strategis OPD : Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien											
	Program : Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSP.22.99.02.01	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Perencanaan, Kasubag Pelaporan	1. Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat 2. penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	Internal	C	data tidak tersedia dari stakeholder		Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	Sekretariat Daerah	
			RSP.22.99.02.02	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Perencanaan, Kasubag Pelaporan	3. Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	Internal	C	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai		dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	
			RSP.22.99.02.03	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Perencanaan, Kasubag Pelaporan		Internal	C	Jaringan/ Peralatan internet yang tidak memadai		dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemd Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Sasaran strategis OPD Urusan Pemerintahan		Kabupaten Lima Puluh Kota Sekretariat Daerah 2023 Periode RENSTRA Tahun 2021-2026 Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berku Penunjang Urusan Perintahan		Risiko			Dampak**)				
No a	Kegiatan b	Indikator Keluaran c	Tahap d	Uraian e	Kode Risiko f	Pemilik g	Sebab*)		C/UC j	Uraian k	Pihak yang Terkena l
							Uraian h	Sumber i			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Pelaksanaan pengumpulan data	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Pelaporan	Data tidak tersedia dan stakeholder	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	Sekretariat Daerah
			Penyusunan/ Melengkapi Dokumen	Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Pelaporan	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah
			Jaringan Sitem Informasi Keuangan Daerah	Terganggunya jaringan Sitem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan	RSP.22.99.02.03	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan	Jaringan/ Peralatan internet yang tidak memadai	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Kabupaten Lima Puluh Kota 2023		Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas Penunjang Urusan Pemerintahan		
Urusan Pemerintahan		"Risiko" yang Teridentifikasi		Analisis Risiko		
No.	a	b	Kode Risiko c	Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan) e	Skala Risiko f=dxe
II		Risiko Strategis OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan				
1		Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	3	2	6
2		Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	3	3	9
3		Terganggunya jaringan Sistim Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSP.22.99.02.03	2	4	8
III		Risiko Operasional OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan				
1		Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	3	2	6
2		Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	3	3	9
3		Terganggunya jaringan Sistim Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSP.22.99.02.03	2	4	8

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2023

: Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas

Urusan Pemerintahan

: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah					
1	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	6	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator	Data tidak tersedia dari stakeholder	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar
2	Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	9	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu
3	Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan	RSP.22.99.02.03	8	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator	Jaringan/ Peralatan internet yang tidak memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu
II	Risiko Operasional OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah					
1	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	6	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator	Data tidak tersedia dari stakeholder	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar
2	Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.03	9	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu
3	Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan	RSP.22.99.02.04	8	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator	Jaringan/ Peralatan internet yang tidak memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 : Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas : Penunjang Urusan Pemerintahan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan						
1	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	Komitmen dari pelaksanaan kegiatan untuk menyediakan bahan kelengkapan/ dokumen SPJ tepat waktu	kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Kepala OPD	Triwulan I - IV
2	penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	Komitmen dari pelaksanaan kegiatan untuk menyediakan bahan kelengkapan/ dokumen SPJ tepat waktu	kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Kepala OPD	Triwulan I - IV
3	terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSP.22.99.02.03	Operator Jaringan SIPKD dari Badan Keuangan	prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan	Peningkatan SDM operator Jaringan SIPKD dan jaringan SIPD	Kepala OPD	Triwulan I - IV
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan						
1	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	Komitmen dari pelaksanaan kegiatan untuk menyediakan bahan kelengkapan/ dokumen SPJ tepat waktu	kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Kepala OPD	Triwulan I - IV

2	penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	Komitmen dari pelaksanaan kegiatan untuk menyediakan bahan kelengkapan/ dokumen SPJ tepat waktu	kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani resiko yang teridentifikasi	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tertatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Kepala OPD	Triwulan I - IV
3	Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSP.22.99.02.03	Operator Jaringan SIPKD dari Badan Keuangan	prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan	Peningkatan SDM operator jaringan SIPKD dan jaringan SIPD	Kepala OPD	Triwulan I - IV

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Nota Dinas, Rapat/ pertemuan seluruh pengelola keuangan, Sosialisasi	Asisten Administrasi Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan	OPD	Triwulan I - IV	Triwulan I - IV Tahun 2023	Pembinaan telah dilaksanakan
2	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Nota Dinas, Rapat/ pertemuan seluruh pengelola keuangan, Sosialisasi	Asisten Administrasi Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan	OPD	Triwulan I - IV	Triwulan I - IV Tahun 2023	Pembinaan telah dilaksanakan
3	Peningkatan SDM operator jaringan SIPKD dan SIPD	Arahan lisan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Asisten Administrasi Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan	OPD	Triwulan I - IV	Triwulan I - IV Tahun 2023	Pembinaan telah dilaksanakan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintah

: Kabupaten Lima Puluh Kota
: 2023
: Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas
: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung	Awal Tahun	Tahun 2023	Pembinaan telah dilaksanakan
2	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung	Awal Tahun	Tahun 2023	Pembinaan telah dilaksanakan
3	Peningkatan SDM operator jaringan SIPKD dan SIPD	Pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung	Awal Tahun	Tahun 2023	Pembinaan telah dilaksanakan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Penilaian
2023
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan
Mewujudkan Koordinasi Pemerintah dan Otonomi Daerah yang berkualitas
Penunjang Urusan Pemerintahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
II										
Risiko Strategis OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan										
1	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	Juni 2023	data tidak tersedia dari stakeholder	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	Sedang Terjadi	Adanya ketegasan pimpinan berupa tertulis dan tertatif jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah ditindaklanjuti
2	Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	Juni 2023	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sedang Terjadi	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tertatif (belum pasti/masih bisa berubah) tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah ditindaklanjuti
3	Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSP.22.99.02.03	Juni 2023	Jaringan/peralatan internet yang memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sedang Terjadi	Peningkatan SDM operator Jaringan SIPKD dan Jaringan SIPD	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah ditindaklanjuti
III										
Risiko Operasional OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan										
1	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSP.22.99.02.01	Juni 2023	data tidak tersedia dari stakeholder	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	Sedang Terjadi	Adanya ketegasan pimpinan berupa tertulis dan tertatif jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah ditindaklanjuti
2	penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSP.22.99.02.02	Juni 2023	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sedang Terjadi	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tertatif (belum pasti/masih bisa berubah) tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah ditindaklanjuti
3	Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	RSP.22.99.02.03	Juni 2023	Jaringan/peralatan internet yang memadai	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sedang Terjadi	Peningkatan SDM operator Jaringan SIPKD dan Jaringan SIPD	Triwulan IV	Oktober 2023	Telah ditindaklanjuti

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
OPD yang Dinilai	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan	
Sasaran Strategis	1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dinamis, profesional dan berkesinambungan
IKU Renstra OPD	1	Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan yang Bertaku
Informasi lain	100%	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan Sasaran Strategis : Meningkatkan fasilitasi pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dinamis, profesional dan berkesinambungan	
IKU Strategis :		
		 Sarlasmak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah
		 WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

<p>Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai Sumber Data Tujuan Strategis</p>	<p>Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 2023 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota RENSTRA 2021-2026 Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan</p>
<p>Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama Keluaran/Hasil Kegiatan</p>	<p>1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p>
<p>Informasi Lain Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>1 Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah 100%</p>
<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Sub. Kegiatan Fasilitasi Protokol</p>
<p>Sariarnak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah</p>	<p>WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>

**Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan									
	Sasaran :									
	Meningkatnya fasilitas pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang dinamis, Profesional dan Berkesinambungan	Terwujudnya Fasilitas Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan yang Berlaku	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Internal & Eksternal	C	Perlu dilibatkan sumber daya manusia yang ada sesuai bidangnya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurangnya operasional	Internal & Eksternal	C	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga informasi yang diterima terkait agenda kegiatan pimpinan	Internal & Eksternal	C	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait

: Kabupaten Lima Puluh Kota
 : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 : 2023
 : 2023
 : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkesinambungan										
	Sasaran : Meningkatnya fasilitas pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang dinamis, Profesional dan Berkesinambungan										
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSP.22.99.02.01	Kepala Daerah	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Internal & Eksternal	C	Perlu dilinearakan sumber daya manusia yang ada sesuai bidangnya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSP.22.99.02.02	Kepala Daerah	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurangnya operasional	Internal & Eksternal	C	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSP.22.99.02.03	Kepala Daerah	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga	Internal & Eksternal	C	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

No	Kegiatan a	Indikator Keluaran b	Tahap c	Risiko		Pemilik g	Sebab ¹⁾		Dampak ²⁾	
				Uraian d	Kode Risiko e		Uraian h	Sumber i	Uraian k	Pihak yang Terkena l
1	Fasilitasi Keprotokolian	Terpublikasinya dan terlaksanainya Kegiatan KDH/WKDH	Penyiapan SOP	Keterlambatan penyelesaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Keterlambatan memahami tentang standar pelayanan operasional protokol dan komunikasi pimpinan	Eksternal	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu proses SOP	Kepala Daerah, Setda
			Pelaksanaan pengumpulan data	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Eksternal	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Setda
			Analisis data	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kurang paham tugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Eksternal	Keterlambatan penilaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah, Setda

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Pelayanan Keprotokolian Dan Komunikasi Pimpinan Yang Dinamis, Profesional dan Berkeshinambungan
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan fasilitas pelayanan keprotokolian dan Komunikasi Pimpinan yang dinamis, Profesional dan Berkeshinambungan
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Tewujudnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dinamis, profesional dan berkesinambungan
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSP.22.99.02	3	3	9
2	Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSP.22.99.02	3	4	12
3	Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSP.22.99.02	3	3	9
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah				
1	Perlu dilinearakan sumber daya manusia yang ada sesuai bidangnya	RSO.22.99.02	3	3	9
2	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	RSO.22.99.02	3	4	12
3	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan	RSO.22.99.02	3	3	9
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah				
1	Keterlambatan penyelesaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ROO.22.99.02	4	3	12
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	3	3	9
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	3	3	9

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

- : Kabupaten Lima Puluh Kota
 : 2023
 : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nama Pemda	Tahun Penilaian	Tujuan Strategis	Urusan Pemerintahan	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
No	a	b	c	d	e	f	g	h		
1		Bimtek dilaksanakan untuk Kepala OPD dan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan	Surat/Bimtek	Bag. Pemerintahan	OPD	Triwulan III 2023	Triwulan IV 2023			
2		Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek bagi OPD	Telaahan Staf	Bagian Pemerintahan	Bupati/TAPD/Badan Keuangan	Triwulan II 2023	Triwulan IV 2023			



RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Bimtek dilaksanakan untuk Kepala OPD dan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Pemerintahan	Triwulan III 2023	Triwulan IV 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
2	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek bagi OPD	Persetujuan Bupati dan pembahasan anggaran oleh TAPD	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Pemerintahan	Triwulan II 2023	Triwulan IV 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
OPD yang Dinilai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
Sasaran Strategis	1	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
IKU Renstra OPD	2	Persentase Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian (%)
Informasi lain		82%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis : Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</p> <p>IKU Strategis : Persentase Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian (%)</p>	
	<p>Sarilamak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota		
Tahun Penilaian	2023		
Periode yang dinilai	2023		
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
OPD yang Dinilai	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026		
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas		
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Persentase kegiatan terkait dengan perekonomian dan sumber daya alam yang terkoordinasi	80%
Informasi Lain			
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</p> <p>Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</p>		
	<p>Sarilamak, Agustus 2023</p> <p> Sekretaris Daerah</p> <p> WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si</p> <p>NIP. 19640404 198603 1 017</p>		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023						
Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan		
a	b	c	d	e	f	g		
1	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perekonomian dan SDA /Distanhortbun	Triwulan III 2023	Triwulan III 2023	Koordinasi, konsultasi dan monitoring telah dilaksanakan		
2	bekerjasama dengan Instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perekonomian dan SDA /Distanhortbun	Triwulan III 2023	Triwulan III 2023	Koordinasi, konsultasi dan monitoring telah dilaksanakan		
3	bekerjasama dengan Instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perekonomian dan SDA /Distanhortbun	Triwulan III 2023	Triwulan III 2023	Koordinasi, konsultasi dan monitoring telah dilaksanakan		
4	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Bagian Perekonomian dan SDA /Distanhortbun	Triwulan III 2023	Triwulan III 2023	Koordinasi, konsultasi dan monitoring telah dilaksanakan		

**Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Uraian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas Sasaran : Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Tidak tepatnya harga pupuk bersubsidi akan mengakibatkan kenaikan harga ditingkat kelompok tani Jenis pupuk bersubsidi yang ada tidak sesuai dengan permintaan kelompok tani dan dapat menghambat pola tanam pertanian Tidak tepat waktunya penyaluran pupuk bersubsidi akan mengakibatkan keterlambatan masa tanam pertanian Pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran akan mengakibatkan kerugian bagi kelompok tani yang berhak mendapatkan	RSP.22.99.02 RSP.22.99.02 RSP.22.99.02 RSP.22.99.02	Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah	Penyelewengan terhadap Harga barang oleh pengecer kepada konsumen (petani) banyaknya distributor/ pengecer mendistribusikan tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) Pendistribusian Pupuk Oleh Pengecer kepada petani tidak berpedoman Kepada RDKK Adanya distributor /pengecer yang tidak menyalurkan kepada petani	Internal & Eksternal Internal & Eksternal Internal & Eksternal Internal & Eksternal	C C C C	Tidak tercapainya sasaran harga yang sesuai RDKK kepada petani, kelompok tidak dapat memenuhi pupuk petani Terjadi gagal panen, terjadinya penumpukan pupuk karena tidak sesuai jenisnya Adanya gagal panen karena keterlambatan dalam pendistribusian pupuk, hasilnya tidak maksimal Tidak tercapainya sasaran pupuk yang didistribusikan sesuai RDKK kepada petani, petani dirugikan	Masyarakat tani, pengecer/kios Masyarakat tani, pengecer/kios Masyarakat tani, pengecer/kios Masyarakat tani, pengecer/kios	

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Kabupaten Lima Puluh Kota Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 Periode yang dinilai Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum Penjang Urusan Pemerintah Daerah												
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko	Uraian		Uraian	Sumber		Uraian	Uraian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas											
	Sasaran :											
	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam											
	Program : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan Penunjang Kegiatan	Tidak tepatnya harga pupuk bersubsidi akan mengakibatkan kenaikan harga di tingkat kelompok tani	RSP.22.99.02.01	Kepala Daerah / Setda	Penyelewengan terhadap Harga barang oleh pengecer kepada konsumen (petani)	Internal & Eksternal	C	Tidak tercapainya sasaran harga yang sesuai RDKK kepada petani, kelompok tidak dapat memenuhi pupuk petani		Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Jenis pupuk bersubsidi yang ada tidak sesuai dengan permintaan kelompok tani dan dapat menghambat pola tanam pertanian	RSP.22.99.02.02	Kepala Daerah / Setda	banyaknya distributor/ pengecer mendistribusikan tidak sesuai dengan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok)	Internal & Eksternal	C	Terjadi gagal panen, terjadinya penumpukan pupuk karena tidak sesuai jenisnya		Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Tidak tepat waktunya penyaluran pupuk bersubsidi akan mengakibatkan keterlambatan masa tanam pertanian	RSP.22.99.02.03	Kepala Daerah / Setda	Pendistribusian Pupuk Oleh Pengecer kepada petani tidak berpedoman Kepada RDKK	Internal & Eksternal	C	Adanya gagal panen karena keterlambatan dalam pendistribusian pupuk, hasilnya tidak maksimal		Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran akan mengakibatkan kerugian bagi kelompok tani yang berhak mendapatkan	RSP.22.99.02.04	Kepala Daerah / Setda	Adanya distributor / pengecer yang tidak menyalurkan kepada petani	Internal & Eksternal	C	Tidak tercapainya sasaran pupuk yang didistribusikan sesuai RDKK kepada petani, petani dirugikan		Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab ^{*)}		C/UC	Dampak ^{**)}	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan Penunjang Kegiatan	Penyusunan regulasi	keterlambatan penyaluran pupuk	RSP.22.99.02.01	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	keterlambatan laporan/pengaduan dari masyarakat/kelompok tani	Eksternal	C	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Kepala Daerah, Setda
			Pelaksanaan pengumpulan data	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSP.22.99.02.02	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	Data yang diambil dari seluruh kios yang ada dinagrai tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Eksternal	C	Terlambatnya pengolahaan data	Kepala Daerah, Setda
			Analisis data	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	RSP.22.99.02.03	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	Kurang paham tugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Eksternal	C	Keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan	Kepala Daerah, Setda

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
"Risiko" yang Teridentifikasi		Kode Risiko	Analisis Risiko
a	b	c	d e f=dxe
I Risiko Strategis			
1	Tidak tepatnya harga pupuk bersubsidi akan mengakibatkan kenaikan harga ditingkat kelompok tani	RSP.22.99.02	4 3 12
2	Jenis pupuk bersubsidi yang ada tidak sesuai dengan permintaan kelompok tani dan dapat menghambat pola tanam	RSP.22.99.02	3 4 12
3	Tidak tepat waktunya penyaluran pupuk bersubsidi akan mengakibatkan keterlambatan masa tanam pertanian	RSP.22.99.02	3 3 9
4	Pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran akan mengakibatkan kerugian bagi kelompok tani yang berhak mendapatkan	RSP.22.99.02	3 4 12
II Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah			
1	Tidak tepatnya harga pupuk bersubsidi akan mengakibatkan kenaikan harga ditingkat kelompok tani	RSO.22.99.02	4 3 12
2	Jenis pupuk bersubsidi yang ada tidak sesuai dengan permintaan kelompok tani dan dapat menghambat pola tanam	RSO.22.99.02	3 4 12
3	Tidak tepat waktunya penyaluran pupuk bersubsidi akan mengakibatkan keterlambatan masa tanam pertanian	RSO.22.99.02	3 3 9
4	Pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran akan mengakibatkan kerugian bagi kelompok tani yang berhak mendapatkan	RSO.22.99.02	3 4 12
III Risiko Operasional OPD : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah			
1	keterlambatan penyaluran pupuk		
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	4 3 12
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	3 3 9
		ROO.22.99.02	3 3 9

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2023

: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum

: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Risiko Prioritas		Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a		b		c	d	e	f	g
Urusan Pemerintahan								
I Risiko Strategis								
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah			RSP.22.99.02	9	Kepala Daerah	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang			RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi			RSP.22.99.02	9	Kepala Daerah	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang			RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
II Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah								
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah			RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang			RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi			RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang			RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	kelangkaan pupuk dipasaran	pupuk yang disalurkan tidak sesuai permintaan dan tidak mencukupi kebutuhan petani
III Risiko Operasional OPD : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah								
1	keterlambatan penyaluran pupuk			ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	Keterlambatan dalam pengusulan pupuk dan pestisida bersubsidi sesuai kebutuhan kelompok	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu			ROO.22.99.02	9	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Terlambatnya pengalihan data
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan			ROO.22.99.02	9	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	Kurang paham tugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Keterlambatan penilaian Indeks ABS-SBK

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda
Tahun Penilaian
: Kabupaten Lima Puluh Kota
: 2023


Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	RSP.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	Kepala daerah	Triwulan III 2023
2	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	RSP.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	Kepala daerah	Triwulan III 2023
3	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	RSP.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	Kepala daerah	Triwulan III 2023
4	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	RSP.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	Kepala daerah	Triwulan III 2023
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						
1	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	RSO.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	Sekretaris Daerah	Triwulan III 2023
2	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	RSO.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	Sekretaris Daerah	Triwulan III 2023
3	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	RSO.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	bekerjasama dengan instansi terkait permintaan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada distributor	Sekretaris Daerah	Triwulan III 2023
4	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	RSO.22.99.02	Koordinasi, konsultasi dan monitoring	minimnya koordinasi yang dilaksanakan	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait	Sekretaris Daerah	Triwulan III 2023

III	Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah	ROO.22.99.02	Kordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Kordinasi yang dilaksanakan belum optimal	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Triwulan III 2023
1	keterlambatan penyaluran pupuk	ROO.22.99.02	Kordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Kordinasi yang dilaksanakan belum optimal	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Triwulan III 2023
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	Time skedul	Pengumpulan data tidak sesuai dengan time skedul	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Triwulan IV 2023
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Penetapan indikator	Prosedur pengumpulan data tidak dijalankan	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA	Triwulan IV 2023

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
Sasaran Strategis	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerjasama, Pembangunan, dan Perekonomian	
IKU Renstra OPD	Persentase OPD dengan pencapaian program dan kegiatan di atas 80%	
Informasi lain	100%	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis : Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerjasama, Pembangunan, dan Perekonomian</p> <p>IKU Strategis : Persentase OPD dengan pencapaian program dan kegiatan di atas 80%</p>	
	 Sarilamak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai Sumber Data	Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 2023 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Persentase OPD dengan pencapaian Program dan Kegiatan di atas 80%	100%
Informasi Lain	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Sanjaya Sekretaris Daerah Agustus 2023	WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si NIP. 19640404 198603 1 017

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No a	Tujuan/Sasaran Strategis/Program b	Indikator Kinerja c	Risiko		Pemilik f	Sebab		C/UC i	Dampak		Pihak yang Terkena k
			Uraian d	Kode Risiko e		Uraian g	Sumber r h		Uraian j		
1	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis : Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerjasama, Pembangunan, dan Perekonomian</p> <p>Program :</p>										
	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	Kurangnya kepatuhan SKPD untuk menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Setda	Keterlambatan penyampaian Laporan RFK dari SKPD akan menyebabkan keterlambatan penginputan rekapitulasi Laporan milik Biro Administrasi Pembangunan, yaitu Simbangda Based Evidence (SBE).	Internal	C	Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan hingga bulan Oktober 2022, hanya 72%.		Kepala Daerah, SKPD terkait
			Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta yang menyebabkan keterlambatan input data, evaluasi data, dan pengambilan tindakan pengendalian.	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Setda	Berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pencapaian realisasi Program dan Kegiatan di atas 80%.	Internal	C	Masih sedikitnya SKPD yang merealisasikan Program dan Kegiatan di atas 80%.		Kepala Daerah, SKPD terkait

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas
 Sasaran strategis OP : Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Bidang Kerjasama, Pembangunan, dan Perekonomian
 Urusan Pemerintahah : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No a	Kegiatan b	Indikator Keluara n c	Tahap d	Risiko		Pemilik g	Sebab ¹		C/UC j	Dampak ²	
				Uraian e	Kode Risiko f		Uraian h	Sumber i		Uraian k	Pihak yang Terkena
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	Penyusunan Regulasi	Tidak terpenuhinya tenggat waktu penyampaian laporan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan lambatny respon SKPD dalam menyipkan data yang diminta Bagian Administrasi Pembangunan.	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan n Setda	Ketidakpatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai Perbup Nomor 92 Tahun 2021	Internal	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda

	Pelaksana dan Pengumpulan Data	Pengumpulan data realisasi fisik dan keuangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Terlambatnya pengolahan dan perekapan data	Internal	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda
Analisis Data	Kurang nya pemahaman Aparatur pelaksana pelaporan dan transfer ilmu yang tidak sempurna ketika terjadi pergantian Aparatur	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Internal	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda	

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023		Daerah yang Berkualitas	
Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	fedxe
I Risiko Strategis					
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	3	4	12
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta				
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01 RSO.22.99.01	3 3	4 4	12 12
II Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah					
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021				
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	3	4	12
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01 RSO.22.99.01	3 3	4 4	12 12
III Risiko Operasional OPD : Bagian Administrasi Pembangunan					
1	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	RSO.22.99.01	4	4	16

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
: 2023
: Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas
: Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah

Risiko Prioritas		Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman pengguna di SKPD terhadap Perbup Nomor 92 Tahun 2021 yang memuat tenggat waktu penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Terlambatnya penyampaian rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan.
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah	Kurangnya prioritas untuk menyampaikan data atau laporan secara tepat waktu	Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hingga bulan Oktober 2022, yaitu 72%.
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah	Kurang meratanya pendistribusian sumber daya untuk melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SDM yang menguasai pelaporan dan teknologi tidak memadai.
II Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya pemahaman pengguna di SKPD terhadap Perbup Nomor 92 Tahun 2021 yang memuat tenggat waktu penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Terlambatnya penyampaian rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan.
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya prioritas untuk menyampaikan data atau laporan secara tepat waktu	Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hingga bulan Oktober 2022, yaitu 72%.
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah / Setda	Kurang meratanya pendistribusian sumber daya untuk melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SDM yang menguasai pelaporan dan teknologi tidak memadai.
III Risiko Operasional OPD : Bagian Administrasi Pembangunan						
1	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	RSO.22.99.01	16	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan	Tidak terpenuhinya tenggat waktu penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Terlambatnya penanganan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pencapaian realisasi Fisik dan Keuangan di atas 80%.

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	Penguatan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kurang efektifnya pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kepala Daerah	Triwulan IV TA 2023
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Tidak semua SKPD menyampaikan data sesuai tenggat waktu	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data	Kepala Daerah	Triwulan IV TA 2023
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan	Melaksanakan koordinasi untuk sharing informasi terkait pelaporan administrasi pembangunan	Kepala Daerah	Triwulan IV TA 2023
II	Risiko Strategis Sekretariat Daerah						
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	Penguatan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kurang efektifnya pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Sekretaris Daerah	Triwulan IV TA 2023
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Tidak semua SKPD menyampaikan data sesuai tenggat waktu	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data	Sekretaris Daerah	Triwulan IV TA 2023
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan	Melaksanakan koordinasi untuk sharing informasi terkait pelaporan administrasi pembangunan	Sekretaris Daerah	Triwulan IV TA 2023
III	Risiko Operasional Bagian Administrasi Pembangunan						
1	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q. Biro Administrasi Pembangunan dan keterlambatan pengambilan tindakan pengendalian permasalahan di SKPD	RSO.22.99.01	Melaksanakan koordinasi yang intens dengan Aparatur yang membidangi pelaporan SKPD	Realisasi tidak sesuai dengan kondisi di SKPD	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan laporan	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan IV TA 2023

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2023

: Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas

: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Nama Pemda	Tahun Penilaian	Tujuan Strategis	Urusan Pemerintahan	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
No	a	b	c	d	e	f	g	h		
1		Melaksanakan pelaporan yang real time dan berbasis pembuktian dengan memanfaatkan aplikasi Simbangda Based Evidence	Sosialisasi	Bagian Administrasi Pembangunan / Dinas Komunikasi dan Informatika / Biro Administrasi Pembangunan	Kasubag KEP pada Kecamatan / Sub Koordinator PP pada SKPD	Triwulan IV TA 2023	Triwulan IV TA 2023			
2		Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dengan realisasi fisik dan keuangan di bawah 50%	Surat / Koordinasi Langsung	Bagian Administrasi Pembangunan	Kasubag KEP pada Kecamatan / Sub Koordinator PP pada SKPD	Triwulan III - IV TA 2023	Triwulan III - IV TA 2023			
3		Monitoring dan Evaluasi bersama Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Rapat / Koordinasi Langsung	Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	SKPD	Triwulan II - IV TA 2023	Triwulan II - IV TA 2023			
4		Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Rapat	Bagian Administrasi Pembangunan / Asisten Perekonomian dan Pembangunan / Narasumber	SKPD	Semester I TA 2023	Semester I TA 2023			

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
a	b	c	d	e	f	g	
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
1	Melaksanakan pelaporan yang real time dan berbasis pembuktian dengan memanfaatkan aplikasi Simbangda Based Evidence	Sosialisasi	Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan IV TA.2023	Triwulan IV TA.2023	Menunggu konfirmasi waktu sosialisasi oleh Biro Administrasi Pembangunan	
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dengan realisasi fisik dan keuangan di bawah 80%	Surat / Koordinasi Langsung	Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan III - IV TA.2023	Triwulan III - IV TA.2023	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan	
3	Monitoring dan Evaluasi bersama Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Rapat / Koordinasi Langsung	Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Triwulan II - IV TA.2023	Triwulan II - IV TA.2023	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan	
4	Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Rapat	Bagian Administrasi Pembangunan / Asisten Perekonomian dan Pembangunan / Narasumber	SKPD	Semester I TA.2023	Rapat Telah Dilaksanakan	

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023

Tujuan Strategis : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	Tahun 2023	Kurangnya pemahaman pengguna di SKPD terhadap Perbup Nomor 92 Tahun 2021 yang memuat tenggat waktu penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Terlambatnya penyampaian rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Gubernur Sumatera Barat c.q. Biro Administrasi Pembangunan.	Melaksanakan pelaporan yang real time dan berbasis pembuktian dengan memanfaatkan aplikasi Simbangda Based Evidence	Triwulan IV TA 2023	Triwulan IV TA 2023	Menunggu konfirmasi waktu sosialisasi oleh Biro Administrasi Pembangunan	
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	Tahun 2023	Kurangnya prioritas untuk menyampaikan data atau laporan secara tepat waktu	Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hingga bulan Oktober 2022, yaitu 72%.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dengan realisasi fisik dan keuangan di bawah 80%	Triwulan III - IV TA 2023	Triwulan III - IV TA 2023	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan	
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	Tahun 2023	Kurang meratanya pendistribusian sumber daya untuk melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SDM yang menguasai pelaporan dan teknologi tidak memadai.	Monitoring dan Evaluasi bersama Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Triwulan II - IV TA 2023	Triwulan II - IV TA 2023	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan	
Masalah/Risiko Baru:										

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota		
Tahun Penilaian	2023		
Periode yang dinilai	2021-2026		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota RENSTRA 2021-2026		
Sumber Data	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas		
Tujuan Strategis	1		
Sasaran Strategis	1 Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota		
IKU Renstra OPD	1		3,15
	2	Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi	100%
	3	Persentasi Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis : Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat</p>		
IKU Strategis	Nilai EKPPD, Persentase Kerjasama dan Persentase Kegiatan Pemerintahan		
			<p>19 Sarilamak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Penilaian	2023
Periode yang dinilai	2023
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023 dan Kegiatan Utama)	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Keluaran/Hasil Kegiatan	1 Lancarnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100%
	2 Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi 100%
	3 Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 100%
	4 Terlaksananya penilaian camat berprestasi 3 orang
	5 Terlaksananya Bimtek dan Penyusunan LPPD, LKPJ dan EPPD 40 OPD
	6 Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM 8 OPD
	7 Persentase terlaksananya fasilitasi Kerja Sama Daerah 100%
	8 Persentase terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah 100%
Informasi Lain	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub. Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Sub. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Sub. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Sub. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Sub. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama
	<p>Sapliantek, Agustus 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>

**Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/IUC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang									
	Sasaran : Meningkatnya fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemahaman terhadap IKK yang belum sama	RSP.22.01.99.02	Kepala Daerah	Peraturan yang mengatur berubah dan SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah	Internal & Eksternal	UC	Nilai EKPPD tidak maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim	RSP.22.01.99.02	Kepala Daerah	Pergantian Pejabat pada saat penyusunan laporan	Internal & Eksternal	UC	Nilai EKPPD tidak maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
		Persentase Kegiatan Pemerintahan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal	RSP.22.01.99.02	Kepala Daerah	Padatnya kegiatan pejabat OPD	Internal & Eksternal	UC	Rapat Koordinasi tidak terlaksana	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
		Persentase Kerja Sama yang terfasilitasi	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	RSP.22.01.99.02	Kepala Daerah	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Internal & Eksternal	UC	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang	RSP.22.01.99.02	Kepala Daerah	kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kerja sama baik yang umum maupun teknis	Internal & Eksternal	C	Tujuan Kerja Sama tidak tercapai	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian 2023 Periode yang dinilai 2023 Tujuan Strategis Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indikator Kinerja c		Uraian d		Risiko Kode Risiko e		Pemilik f		Sebab Uraian g		Sumber h		C/UC i		Dampak Uraian j		Pihak yang Terkena k	
a	b	c		d		e		f		g		h		i		j		k	
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas																		
	Sasaran : Meningkatnya fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat																		
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase teraksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Pemahaman terhadap IKK yang belum sama		RSO.22.01.99.02		Kepala Daerah / Setda		Peraturan yang mengatur berubah dan SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah		Internal & Eksternal		UC		Nilai EKPPD tidak maksimal		Kepala Daerah, OPD terkait	
		Keseseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim		Keseseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim		RSO.22.01.99.02		Kepala Daerah / Setda		Pergantian Pejabat pada saat penyusunan laporan		Internal & Eksternal		UC		Nilai EKPPD tidak maksimal		Kepala Daerah, OPD terkait	
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal		Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal		RSO.22.01.99.02		Kepala Daerah / Setda		Padatnya kegiatan pejabat OPD		Internal & Eksternal		UC		Rapat Koordinasi tidak terlaksana		Kepala Daerah, OPD terkait	
		Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dan OPD belum Optimal		Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dan OPD belum Optimal		RSO.22.01.99.02		Kepala Daerah / Setda		kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama		Internal & Eksternal		UC		Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD		Kepala Daerah, OPD terkait	
		Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang		Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang		RSO.22.01.99.02		Kepala Daerah / Setda		kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kerja sama baik yang umum maupun teknis		Internal & Eksternal		C		Tujuan Kerja Sama tidak tercapai		Kepala Daerah, OPD terkait	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
 Urusan Pemerintahan : Penujang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab ¹⁾		C/UC	Dampak ²⁾	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	Menyurati OPD untuk penyampaian laporan LPPD, LKPJ dan SPM	Surat yang sampai ke OPD tidak langsung di respon	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	Ketidak pahaman terhadap urgensi laporan yang dibutuhkan	Eksternal	C	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan SPM terlambat	Kepala Daerah, Setda
			Pelaksanaan pengumpulan data	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	Pemahaman yang kurang terhadap indikator yang dibutuhkan utk penyusunan laporan	Eksternal	C	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Setda
			Analisis data	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Eksternal	C	Terlambatnya penyampaian Laporan	Kepala Daerah, Setda
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan fasilitasi Kerja Sama Daerah	Penyiapan SK TKKSD	Keenggotaan TKKSD yang tidak sesuai dengan Kompetensi yang dibutuhkan	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	Pengisian formasi keenggotaan TKKSD telah diatur secara baku oleh peraturan perundang-undangan	Eksternal	C	Hasil Kesepakatan Bersama tidak maksimal	Kepala Daerah, Setda
			Penyampaian Surat Identifikasi dan Pemetaan Kerja Sama	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Internal & Eksternal	UC	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD	Kepala Daerah, Setda
			Fasilitasi pelaksanaan kerja sama	Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kerja sama baik yang umum maupun teknis	Internal & Eksternal	C	Tujuan Kerja Sama tidak tercapai	Kepala Daerah, Setda
			Koordinasi dengan mitra kerja sama	Terbatasnya dana koordinasi dengan mitra kerja sama	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	kurangnya pemahana TAPD terhadap tupoksi yang berkaitan dengan kerja sama daerah	Internal & Eksternal	UC	Kerja Sama tidak berjalan sesuai SOP	Kepala Daerah, Setda
			Pengajuan permintaan rekomendasi DPRD	Rencana Kerja sama tidak disetujui Legislatif akan mengakibatkan rencana kerja sama tidak terwujud	ROO.22.01.99.02	Setda / Bagian Pemerintahan	Rencana Kerja Sama belum teranggarkan pada APBD dan membebani masyarakat	Internal & Eksternal	UC	Batalnya pelaksanaan Kerja Sama	Kepala Daerah, Setda dan masyarakat

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		"Risiko" yang Teridentifikasi		Analisis Risiko		Skala Risiko f=dxe
Urusan Pemerintahan		Kode Risiko	Skala	Skala	Skala Risiko	
No.	a	b	c	d	e	f=dxe
	: Kabupaten Lima Puluh Kota					
	: 2023					
	: Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas					
	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Risiko Strategis					
1	Pemahaman terhadap IKK yang belum sama		RSP.22.01.99.02	3	3	9
2	Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim		RSP.22.01.99.02	3	4	12
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal		RSP.22.01.99.02	3	3	9
4	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal		RSP.22.01.99.02	3	4	12
5	Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang		RSP.22.01.99.02	3	4	12
	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah					
1	Pemahaman terhadap IKK yang belum sama		RSO.22.01.99.02	3	3	9
2	Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim		RSO.22.01.99.02	3	4	12
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal		RSO.22.01.99.02	3	3	9
4	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal		RSO.22.01.99.02	3	4	12
5	Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang		RSO.22.01.99.02	3	4	12
	Risiko Operasional OPD : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah					
1	Surat yang sampai ke OPD tidak langsung di respon		ROO.22.01.99.02	4	3	12
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu		ROO.22.01.99.02	3	3	9
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan		ROO.22.01.99.02	3	3	9
4	Keanggotaan TKKSD yang tidak sesuai dengan Kompetensi yang dibutuhkan		ROO.22.01.99.02	3	3	9
5	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal		ROO.22.01.99.02	3	4	12
6	Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang		ROO.22.01.99.02	3	4	12
7	Terbatasnya dana koordinasi dengan mitra kerja sama		ROO.22.01.99.02	3	3	9
8	Rencana Kerja sama tidak disetujui Legislatif akan mengakibatkan rencana kerja sama tidak terwujud		ROO.22.01.99.02	3	3	9

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2023

: Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas

: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan						
No	Risiko Prioritas b	Kode Risiko c	Skala Risiko d	Pemilik Risiko e	Penyebab f	Dampak g
I	Risiko Strategis Pemahaman terhadap IKK yang belum sama					
1	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	RSP.22.01.99.02	9	Kepala Daerah	Peraturan yang mengatur berubah dan SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah	Nilai EKPPD tidak maksimal
2		RSP.22.01.99.02	12	Kepala Daerah	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan					
1	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.22.01.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	Peraturan yang mengatur berubah dan SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah	Nilai EKPPD tidak maksimal
2		ROO.22.01.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan					
1	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.22.01.99.02	9	Setda / Bagian Pemerintahan	Peraturan yang mengatur berubah dan SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah	Nilai EKPPD tidak maksimal
2		ROO.22.01.99.02	12	Setda / Bagian Pemerintahan	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pemahaman terhadap IKK yang belum sama	ROO.22.01.99.02	Pelaksanaan Bimtek untuk Penyusunan Laporan	Bimtek sudah dilaksanakan namun untuk kepesertaan masih terbatas	Bimtek dilaksanakan untuk Kepala OPD dan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan	Kepala daerah	Triwulan IV 2023
2	Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim	ROO.22.01.99.02	Penyampaian surat susulan pada OPD yang belum memenuhi permintaan data IKK	Surat susulan sudah disampaikan namun belum ditindaklanjuti oleh OPD	Menyampaikan surat teguran pada OPD Teknis yang belum memenuhi permintaan data IKK	Kepala daerah	Triwulan I & II 2023
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal	ROO.22.01.99.02	Penjadwalan Rapat Koordinasi setiap bulan sudah ditetapkan namun masih belum terlaksana sesuai rencana	Penyampaian resedule rapat koordinasi namun masih ada Ka OPD yang tidak menghadiri	Teguran dari Pimpinan bagi Ka OPD yang tidak menghadiri Rapat Koordinasi	Kepala daerah	Triwulan I, II, III & IV 2023
4	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.22.01.99.02	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi bagi OPD Teknis terkait penyusunan dan penganggaran kerja sama	Tidak tersedia anggaran	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek bagi OPD	Kepala daerah	Triwulan IV 2023
5	Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang	ROO.22.01.99.02	Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Kerja Sama Daerah kepada seluruh Kepala OPD	Tidak tersedia anggaran	Penambahan Anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi	Kepala daerah	Triwulan IV 2023

II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah								
1	Pemahaman terhadap IKK yang belum sama	ROO.22.01.99.02	Pelaksanaan Bimtek untuk Penyusunan Laporan	Bimtek sudah dilaksanakan namun untuk kepesertaan masih terbatas	Bimtek dilaksanakan untuk Kepala OPD dan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan	Kepala daerah	Triwulan IV 2023		
2	Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim	ROO.22.01.99.02	Penyampaian surat susulan pada OPD yang belum memenuhi permintaan data IKK	Surat susulan sudah disampaikan namun belum ditindaklanjuti oleh OPD	Menyampaikan surat teguran pada OPD Teknis yang belum memenuhi permintaan data IKK	Kepala daerah	Triwulan I & II 2023		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal	ROO.22.01.99.02	Penjadwalan Rapat Koordinasi setiap bulan sudah ditetapkan namun masih belum terlaksana sesuai rencana	Penyampaian reschedule rapat koordinasi namun masih ada Ka OPD yang tidak menghadiri	Teguran dari Pimpinan bagi Ka OPD yang tidak menghadiri Rapat Koordinasi	Kepala daerah	Triwulan I, II, III & IV 2023		
4	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.22.01.99.02	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi bagi OPD Teknis terkait penyusunan dan penganggaran kerja sama	Tidak tersedia anggaran	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek bagi OPD	Kepala daerah	Triwulan IV 2023		
5	Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang	ROO.22.01.99.02	Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peraturan Kerja Sama Daerah kepada seluruh Kepala OPD	Tidak tersedia anggaran	Penambahan Anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi	Kepala daerah	Triwulan IV 2023		
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah								
1	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.01.99.02	Pemantapan pemahaman indikator	Koordinasi pemantapan pemahaman indikator kurang	Pengumpulan data sesuai indikator yang telah ditetapkan permenagri	Kepala Bagian Pemerintahan	Triwulan IV 2023		
2	Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.22.01.99.02	Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi bagi OPD Teknis terkait penyusunan dan penganggaran kerja sama	Tidak tersedia anggaran	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek bagi OPD	Kepala Bagian Pemerintahan	Triwulan IV 2023		

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

: Kabupaten Lima Puluh Kota
: 2023

: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melaksanakan pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Rapat / Pelatihan	Bapelitbang	perangkat daerah	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
2	Melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Rapat / Pelatihan	Bapelitbang	perangkat daerah	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
3	Menekankan integritas pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan serta efisiensi dan efektifitas anggaran	Rapat / Surat Edaran / Koordinasi langsung	Bagian Organisasi	perangkat daerah	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
4	Melaksanakan pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Rapat / Pelatihan	Bagian Organisasi	perangkat daerah	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
5	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Rapat / Koordinasi langsung	Bagian Organisasi	perangkat daerah	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
6	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Rapat / Koordinasi langsung	Bagian Organisasi	perangkat daerah	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
7	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Rapat / Koordinasi langsung	Bagian Organisasi	perangkat daerah	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
8	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Rapat / Koordinasi langsung	Bagian Organisasi	perangkat daerah	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda
Tahun Penilaian

: Kabupaten Lima Puluh Kota
: 2023

Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Melaksanakan pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah/ Bapelitbang	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan
2	Melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah/ Bapelitbang	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan
3	Menekankan integritas pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan serta efisiensi dan efektifitas anggaran	Koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Organisasi	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
4	Melaksanakan pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Organisasi	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
5	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Organisasi	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
6	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Organisasi	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
7	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Organisasi	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
8	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Organisasi	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal Awal	Sebab					
I	Risiko Strategis Pemda								
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih memerlukan perbaikan	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal	Melaksanakan pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan
2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Dokumen Perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan sasaran strategis	Program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat	Melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan
3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan OPD	Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP belum maksimal	Menekankan integritas pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan serta efisiensi dan efektifitas anggaran	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum diformulasikan dengan baik	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Keterbatasan dalam pengungkapan informasi laporan kinerja	Laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara maksimal	Melaksanakan pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
	Masalah/Risiko Baru:								
II	Risiko Strategis Sekretariat Daerah								
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih memerlukan perbaikan	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal	Melaksanakan pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan

2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Dokumen Perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan sasaran strategis	Program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat	Melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi telah dilaksanakan
3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan OPD	Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP belum maksimal	Menekankan integritas pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan serta efisiensi dan efektifitas anggaran	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Keterbatasan dalam pengungkapan informasi laporan kinerja	Laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara maksimal	Melaksanakan pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
	Masalah/Risiko Baru:								
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan								
1	Pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak lengkap	ROO.22.99.02	Triwulan I	Data pada perangkat daerah belum lengkap	Terlambatnya pengolahan data	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
2	Keterlambatan perangkat daerah menyampaikan data pelengkap	ROO.22.99.02	Triwulan I	Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam mengumpulkan data	Terlambatnya penyusunan laporan	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
3	Laporan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Triwulan I	Kurangnya pengetahuan perangkat daerah tentang keselasan indikator perencanaan dan pelaporan	Rendahnya nilai evaluasi internal	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
4	Laporan belum sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian	ROO.22.99.02	Triwulan I	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan strategis yang mampu menjawab isu strategis yang dijawabnya	Rendahnya nilai SAKIP	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Koordinasi dan laporan telah dilaksanakan
	Masalah/Risiko Baru:								

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2023

: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum

: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Risiko Prioritas		Skala Risiko		Pemilik Risiko		Penyebab		Dampak			
a		b		c		d		e		f		g	
I		Risiko Strategis											
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih memerlukan perbaikan	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal							
2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Dokumen Perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan sasaran strategis	Program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat							
3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan OPD	Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehinggaimplementasi SAKIP belum maksimal							
4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Keterbatasan dalam pengungkapan informasi laporan kinerja	Laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara maksimal							
II		Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah											
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih memerlukan perbaikan	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal							
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Dokumen Perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan sasaran strategis	Program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat							
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan OPD	Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehinggaimplementasi SAKIP belum maksimal							
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Keterbatasan dalam pengungkapan informasi laporan kinerja	Laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara maksimal							

III	Risiko Operasional OPD : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah					
1	Pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak lengkap	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Organisasi	Data pada perangkat daerah belum lengkap	Terlambatnya pengolahan data
2	Keterlambatan perangkat daerah menyampaikan data pelengkap	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam mengumpulkan data	Terlambatnya penyusunan laporan
3	Laporan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya pengetahuan perangkat daerah tentang keselarasan indikator perencanaan dan pelaporan	Rendahnya nilai evaluasi internal
4	Laporan belum sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Organisasi	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan strategis yang mampu menjawab isu strategis yang dijawabnya	Rendahnya nilai SAKIP

**Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Kabupaten Lima Puluh Kota					
Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum					
: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSP.22.99.02	Pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Pelatihan SDM tidak terlaksana dan anggaran tidak tersedia	Melaksanakan pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Kepala daerah	Triwulan II 2023
2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSP.22.99.02	Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Pelatihan SDM tidak terlaksana dan anggaran tidak tersedia	Melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Kepala daerah	Triwulan I 2023
3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSP.22.99.02	Pelaksanaan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penandatanganan pakta integritas	Jadwal pimpinan berbenturan dengan kegiatan lain	Menekankan integritas pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan serta efisiensi dan efektifitas anggaran	Kepala daerah	Triwulan I 2023
4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSP.22.99.02	Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Pelatihan SDM tidak terlaksana dan anggaran tidak tersedia	Melaksanakan pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Kepala daerah	Triwulan II 2023
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						

1	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSO.22.99.02	Pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Pelatihan SDM tidak terlaksana dan anggaran tidak tersedia	Melaksanakan pelatihan SDM terkait perencanaan kinerja	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2023
2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSO.22.99.02	Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Pelatihan SDM tidak terlaksana dan anggaran tidak tersedia	Melaksanakan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023
3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSO.22.99.02	Pelaksanaan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penandatangan pakta integritas	Jadwal pimpinan berbenturan dengan kegiatan lain	Menekankan integritas pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan serta efisiensi dan efektifitas anggaran	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023
4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSO.22.99.02	Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Pelatihan SDM tidak terlaksana dan anggaran tidak tersedia	Melaksanakan pelatihan SDM pengelola akuntabilitas	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2023
III							
Risiko Operasional OPD : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah							
1	Pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak lengkap	ROO.22.99.02	Koordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Prosedur pengumpulan data tidak dijalankan	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Organisasi	Triwulan I 2023
2	Keterlambatan perangkat daerah menyampaikan data pelengkap	ROO.22.99.02	Koordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Data yang disampaikan masih belum lengkap	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Organisasi	Triwulan I 2023
3	Laporan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Koordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Organisasi	Triwulan II 2023
4	Laporan belum sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian	ROO.22.99.02	Koordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Data yang disusun tidak sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Organisasi	Triwulan III 2023

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
a	b	c	d	e	f	g
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
I	Risiko Strategis					
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman pengguna di SKPD terhadap Perbup Nomor 92 Tahun 2021 yang memuat tenggat waktu penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Terlambatnya penyampaian rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan.
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah	Kurangnya prioritas untuk menyampaikan data atau laporan secara tepat waktu	Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hingga bulan Oktober 2022, yaitu 72%.
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah	Kurang meratanya pendistribusian sumber daya untuk melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SDM yang menguasai pelaporan dan teknologi tidak memadai.
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah					
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya pemahaman pengguna di SKPD terhadap Perbup Nomor 92 Tahun 2021 yang memuat tenggat waktu penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Terlambatnya penyampaian rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan.
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya prioritas untuk menyampaikan data atau laporan secara tepat waktu	Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota hingga bulan Oktober 2022, yaitu 72%.
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	12	Kepala Daerah / Setda	Kurang meratanya pendistribusian sumber daya untuk melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SDM yang menguasai pelaporan dan teknologi tidak memadai.
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Administrasi Pembangunan					
1	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	RSO.22.99.01	16	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan	Tidak terpenuhinya tenggat waktu penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Terlambatnya penanganan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pencapaian realisasi Fisik dan Keuangan di atas 80%.

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	Penguatan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kurang efektifnya pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kepala Daerah	Triwulan IV TA 2023
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Tidak semua SKPD menyampaikan data sesuai tenggat waktu	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data	Kepala Daerah	Triwulan IV TA 2023
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan	Melaksanakan koordinasi untuk sharing informasi terkait pelaporan administrasi pembangunan	Kepala Daerah	Triwulan IV TA 2023
II	Risiko Strategis Sekretariat Daerah						
1	Masih kurangnya kepatuhan SKPD dalam menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam Perbup Nomor 92 Tahun 2021	RSO.22.99.01	Penguatan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi	Kurang efektifnya pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data	Sekretaris Daerah	Triwulan IV TA 2023
2	Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Tidak semua SKPD menyampaikan data sesuai tenggat waktu	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan data	Sekretaris Daerah	Triwulan IV TA 2023
3	Pergantian Aparatur yang mengelola pelaporan (mutasi/promosi/rotasi) tanpa transfer ilmu kepada penggantinya	RSO.22.99.01	Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara maksimal	Pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan	Melaksanakan koordinasi untuk sharing informasi terkait pelaporan administrasi pembangunan	Sekretaris Daerah	Triwulan IV TA 2023
III	Risiko Operasional Bagian Administrasi Pembangunan						
1	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q. Biro Administrasi Pembangunan dan keterlambatan pengambilan tindakan pengendalian permasalahan di SKPD	RSO.22.99.01	Melaksanakan koordinasi yang intens dengan Aparatur yang membidangi pelaporan SKPD	Realisasi tidak sesuai dengan kondisi di SKPD	Melaksanakan koordinasi langsung untuk mempercepat pengumpulan laporan	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan IV TA 2023

PENINGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

: Kabupaten Lima Puluh Kota

: 2023

: Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas



: Penujang Urusan Pemerintah Daerah

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan								
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan	
a	b	c	d	e	f	g	h	
1	Melaksanakan pelaporan yang real time dan berbasis pembuktian dengan memanfaatkan aplikasi Simbangda Based Evidence	Sosialisasi	Bagian Administrasi Pembangunan / Dinas Komunikasi dan Informatika / Biro Administrasi Pembangunan	Kasubag KEP pada Kecamatan / Sub Koordinator PP pada SKPD	Triwulan IV TA 2023	Triwulan IV TA 2023		
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dengan realisasi fisik dan keuangan di bawah 50%	Surat / Koordinasi Langsung	Bagian Administrasi Pembangunan	Kasubag KEP pada Kecamatan / Sub Koordinator PP pada SKPD	Triwulan III - IV TA 2023	Triwulan III - IV TA 2023		
3	Monitoring dan Evaluasi bersama Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Rapat / Koordinasi Langsung	Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	SKPD	Triwulan II - IV TA 2023	Triwulan II - IV TA 2023		
4	Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Rapat	Bagian Administrasi Pembangunan / Asisten Perencanaan dan Pembangunan / Narasumber	SKPD	Semester I TA 2023	Semester I TA 2023		



RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
a	b	c	d	e	f	g
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Melaksanakan pelaporan yang real time dan berbasis pembuktian dengan memanfaatkan aplikasi Simbangda Based Evidence	Sosialisasi	Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan IV TA 2023	Triwulan IV TA 2023	Menunggu konfirmasi waktu sosialisasi oleh Biro Administrasi Pembangunan
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dengan realisasi fisik dan keuangan di bawah 80%	Surat / Koordinasi Langsung	Bagian Administrasi Pembangunan	Triwulan III - IV TA 2023	Triwulan III - IV TA 2023	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan
3	Monitoring dan Evaluasi bersama Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Rapat / Koordinasi Langsung	Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Triwulan II - IV TA 2023	Triwulan II - IV TA 2023	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan
4	Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan	Rapat	Bagian Administrasi Pembangunan / Asisten Perekonomian dan Pembangunan / Narasumber	SKPD	Semester I TA 2023	Rapat Telah Dilaksanakan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Sumber Data	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tujuan Strategis	RENSTRA 2021-2026	
Sasaran Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
IKU Renstra OPD	1	Meningkatnya Pelayanan, Administrasi Umum yang efektif dan efisien
Informasi lain	1	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	70	
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
Sasaran Strategis	Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien	
IKU Strategis	Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	
	 Sarilamak Agustus 2023 Sekretaris Daerah	
	 WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19840404 198603 1 017	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2023	
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
OPD yang Dinilai	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
Program Sekretariat Daerah (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Nilai AKIP Pemda
Informasi Lain		80%
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	
	Kegiatan Penataan Organisasi	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		 Saplantak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah
		 WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas									
	Sasaran :									
	Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien	Nilai Komponen Pelaporan akuntabilitas kinerja	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih memerlukan perbaikan	Internal	C	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD
			Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Dokumen Perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan sasaran strategis	Internal	C	Program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD
			Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan OPD	Internal	C	Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP belum maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD
			Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Keterbatasan dalam pengungkapan informasi laporan kinerja	Internal	C	Laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Uraian		Sumber	Uraian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien Program :										
	Penjangk urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota masih memerlukan perbaikan	Internal	C	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Dokumen Perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan sasaran strategis	Internal	C	Program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Keterbatasan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan OPD	Internal	C	Keputusan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP belum maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
			Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Keterbatasan dalam pengungkapan informasi laporan kinerja	Internal	C	Laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Tenwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Pelayanan administrasi umum yang efektif dan efisien
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Kode Risiko	Pemilik	Sebab ¹⁾		C/UC	Dampak ²⁾	
			Tahap	Uraian	Uraian	Uraian			Sumber	Uraian		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Perencanaan	Pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak lengkap	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Organisasi	Data pada perangkat daerah belum lengkap	Internal	C	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Setda		
			Pelaksanaan	Keterlambatan perangkat daerah menyampaikan data pelengkap	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam mengumpulkan data	Internal		Terlambatnya penyusunan laporan	Kepala Daerah, Setda		
			Reviu Inspektorat	Laporan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya pengetahuan perangkat daerah tentang keselasan indikator perencanaan dan pelaporan	Internal	C	Rendahnya nilai evaluasi internal	Kepala Daerah, Setda		
			Monitoring dan Evaluasi	Laporan belum sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Organisasi	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan strategis yang mampu menjawab isu strategis yang dijawabnya	Internal		Rendahnya nilai SAKIP	Kepala Daerah, Setda		

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum			
Urusan Pemerintahan		: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	
a	b	c	d	e	f=dxe
Risiko Strategis					
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSP.22.99.02	4	3	12
2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSP.22.99.02	3	4	12
3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSP.22.99.02	4	3	12
4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSP.22.99.02	3	4	12
Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah					
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja	RSO.22.99.02	4	3	12
2	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mampu menjawab isu strategis yang dihadapinya	RSO.22.99.02	3	4	12
3	Keterlibatan pimpinan OPD dalam penetapan kinerja dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pencapaian kinerja belum maksimal	RSO.22.99.02	4	3	12
4	Umpan balik dari laporan kinerja yang berupa perbaikan atas perencanaan kinerja belum dirumuskan dengan baik	RSO.22.99.02	3	4	12
Risiko Operasional OPD : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah					
1	Pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak lengkap	ROO.22.99.02	3	4	12
2	Keterlambatan perangkat daerah menyampaikan data pelengkap	ROO.22.99.02	3	4	12
3	Laporan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	4	3	12
4	Laporan belum sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian	ROO.22.99.02	4	3	12

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Kerjasama dengan PPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 2. Membuat Perbup tentang Pengadaan Barang / Jasa yang dimulai dari Perencanaan PBJ sampai serah terima PBJ	Koordinasi	Kepala UKPBJ	Oktober s.d Desember	Desember	
2	Dilakukan evaluasi pada tiap komponen kematangan UKPBJ	Dokumen kematangan UKPBJ	Kepala UKPBJ, SubKoordinator Pembinaan dan Advokasi	Triwulan II	April s.d Oktober	
3	Dikeluarkan edaran percepatan PBJ	Kepastian penyampaian Surat Edaran ke SKPD	Kepala UKPBJ, Sekretaris Daerah	Triwulan I	Januari	
4	1. Dikeluarkan edaran terhadap pengadaan barang/jasa 2. Dilakukan pendampingan terhadap pengadaan barang/jasa	Kepastian penyampaian Surat Edaran ke SKPD	Kepala UKPBJ, Sekretaris Daerah, Tim Advokasi PBJ	Triwulan I	Januari	
5	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun Perencanaan dalam Tahun Berjalan	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	April, Mei, dan Desember	Januari, Februari, November, Desember	
6	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Maret, April	Februari, Maret	
7	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tepat waktu	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Maret s.d Agustus	Mei, Juni	
8	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk melakukan Pengendalian Kontrak dengan mempedomani peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Maret s.d Desember	Juli s.d Desember	
9	Pengguna Anggaran dalam menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan penggunaan Produksi Dalam Negeri	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	PA, dan PPK Kegiatan	Januari s.d Maret	Maret s.d April	

10	Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun pemakatan pekerjaan agar memprioritaskan pemanfaatan katalog(nasional, sektoral, lokal)	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	PPK Kegiatan	Januari s.d Maret	Maret s.d April
11	Masing-masing Perangkat Daerah dan UKPBJ segera melakukan perhitungan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk kebutuhan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan kerja masing-masing	Pemantauan Berkelanjutan oleh Tim Khusus	Tim Pelaksanaan Inpassing	Maret s.d Mei	April dan Oktober
12	Penganggaran kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional untuk peningkatan kapasitas bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Agustus s.d Desember	November
13	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Pemantauan Berkelanjutan oleh Tim Khusus	Tim Penyusun Format Standar	Maret s.d Mei	Oktober s.d November
14	Aktifnya Perangkat Daerah memanfaatkan UKPBJ sebagai sarana untuk pendampingan dan wahana konsultasi bagi para pelaku pengadaan	Pemantauan Berkelanjutan oleh Atasan	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Tiap Bulan	Januari s.d Desember
15	Tepat waktunya Perangkat Daerah mengemukakan RUP sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKADPA Kegiatan	Melalui Aplikasi SIRUP	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Januari s.d Maret	Maret dan April
16	Terlayannya pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) yang efektif dan efisien dengan menggunakan media/sarana yang representatif	Pemanfaatan sarana dan prasarana	Sekrearis Daerah, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian PBJ	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda Masih adanya peluang terjadinya permasalahan sengketa kontrak dan sengketa hukum pengadaan barang / jasa		Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	1. Kerjasama dengan PPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 2. Membuat Perbup tentang Pengadaan Barang / Jasa yang dimulai dari Perencanaan PBJ sampai serah terima PBJ	Desember	Oktober s.d Desember	
	Tidak tercapainya tujuan organisasi		Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Dilakukan evaluasi pada tiap komponen kematangan UKPBJ	Desember	Desember	
	Pelaksanaan pemilihan penyedia tidak tepat waktu		5 Juli 2023	Pelaksanaan pemilihan Puskesmas Pangkalan waktunya sangat mepet dengan batas waktu penginputan di aplikasi	Penandatanganan Kontrak di hari terakhir batas waktu penginputan di aplikasi		Dikeluarkan edaran percepatan PBJ	Triwulan III	20 Juli 2023	
	Masalah/Risiko Baru:									
II	Risiko Strategis Sekretariat Daerah									
1	Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku		Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	1. Dikeluarkan edaran terhadap pengadaan barang/jasa 2. Dilakukan pendampingan terhadap pengadaan barang/jasa	Januari s.d Desember	Juli s.d Desember	
	Masalah/Risiko Baru:									
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan									
1	Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dalam tahun berjalan, sama dengan waktu pelaksanaan fisiknya		5 Juli 2023	Perencanaan pembangunan empat Puskesmas pada tahun berjalan (2023)	Terlambatnya proses pemilihan penyedia sehingga rentan terjadinya gagal kontrak		Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun Perencanaan dalam Tahun Berjalan	Triwulan III	20 Juli 2023	UKPBJ telah membuat instruksi dan edaran dari Kepala Daerah

<p>menyusun, menetapkan dan mengemukakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.</p>	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	<p>Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun, menetapkan dan mengemukakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.</p>	Triwulan I TA 2023	Maret
<p>3 Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa</p>	5 Juli 2023	Perencanaan pembangunan empat Puskesmas pada tahun berjalan (2023)	Terlambatnya proses pemilihan penyedia sehingga rentan terjadinya gagal kontrak		<p>Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tepat waktu</p>	Triwulan I dan paling lambat Triwulan II TA 2023	April
<p>4 Tidak terlaksananya Pengendalian Kontrak</p>	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	<p>Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk melakukan Pengendalian Kontrak dengan mempedomani peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku</p>	Waktu Pelaksanaan Kontrak	Juli s.d Desember
<p>5 Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri</p>	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	<p>Pengguna Anggaran dalam menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan penggunaan Produksi Dalam Negeri</p>	Mulai Maret 2023	Maret
<p>6 Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal</p>	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	<p>Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun pemaketan pekerjaan agar memprioritaskan pemanfaatan katalog(nasional, sektoral, lokal)</p>	Mulai Maret 2023	Juli s.d Desember

Kategori	Masing-masing Perangkat Daerah dan UKPBJ segera melakukan perhitungan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan kerja masing-masing	Paling lambat Oktober 2023	November s.d Desember
8	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak profesional dan handal dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
9	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
10	Tidak terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
11	Tidak seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh SKPD pada aplikasi SIRUP	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
12	Belum maksimalnya pelayanan administrasi secara elektronik kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
13	Pengaruh kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional untuk peningkatan kapasitas bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
14	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
15	Aktifnya Perangkat Daerah memanfaatkan UKPBJ sebagai sarana untuk pendampingan dan wahana konsultasi bagi para pelaku pengadaan	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
16	Tepat waktunya Perangkat Daerah mengumumkan RUP sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKADPA Kegiatan	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi
17	Tertayangnya pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) yang efektif dan efisien dengan menggunakan media/sarana yang representatif	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
OPD yang Dinilai	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
Sasaran Strategis	1 Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	
IKU Renstra OPD	1 Jumlah kasus yang ditangani terkait pelayanan bantuan hukum terhadap aparatur dan masyarakat	2
	2 Presentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	100%
	3 Jumlah rancangan produk Hukum yang ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	178
	4 Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan	1
	5 Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	60 Aparatur
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis : Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum</p> <p>IKU Strategis : Persentase rancangan produk Hukum yang ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah</p>	
	<p>Santiana, Augustus 2023 Sekretaris Daerah</p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Penilaian	2023
Periode yang dinilai	2023
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
OPD yang Dinilai	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023 dan Kegiatan Utama)	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Keluaran/Hasil Kegiatan	1 Jumlah produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah 178
	2 Jumlah kasus yang ditangani terkait pelayanan bantuan hukum terhadap aparatur dan masyarakat 2
	3 Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan 100%
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	2 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
	1 Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan 1
	2 Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan 60 Aparatur
Informasi Lain	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
	Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
	Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	10 Sarilamak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah
	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas										
	Sasaran :										
	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Keterlambatan Pembentukan Produk hukum daerah	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Peraturan Perundang-Undangan yang masih berubah-ubah	Eksternal	C	Pembentukan Produk Hukum Daerah yang terhambat	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
		Jumlah Kasus yang ditangani terkait pelayanan bantuan hukum terhadap aparatur dan masyarakat	Banyaknya Gugatan yang masuk kepada Pemerintah Daerah	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Belum optimalnya penanganan gugatan yang masuk kepada pemerintah daerah	Eksternal	C	Penanganan gugatan tidak maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
		Persentase Peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	Belum tersedianya JDJH bagian Hukum	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Kurangnya Anggaran untuk pembuatan aplikasi	Eksternal	C	Sulitnya masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
		Jumlah Penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan produk hukum daerah	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Kurangnya minat masyarakat memahami produk hukum daerah	Eksternal	C	Tidak optimalnya pelaksanaan produk hukum daerah	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Belum optimalnya pemahaman Aparatur terhadap pembentukan produk hukum daerah	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Kurang maksimalnya pemahaman aparatur	Eksternal	C	Terhambatnya pembentukan produk hukum daerah	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota		Nama OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		Tahun Penilaian 2023		Periode yang dinilai 2023		Tujuan Strategis Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas		Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja		Risiko		Pemilik		Sebab		C/UC	Dampak	
		a	b	c	d	e	f	g	h		i	j
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas											
	Sasaran :											
	Meningkatnya fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat											
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat											
	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Keterlambatan Pembentukan Produk hukum daerah		RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Peraturan Perundang-Undangan yang masih berubah-ubah		Eksternal	C	Pembentukan Produk Hukum Daerah yang terhambat	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Banyaknya Gugatan yang masuk kepada Pemerintah Daerah		RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Belum optimalnya penanganan gugatan yang masuk kepada pemerintah daerah		Eksternal	C	Penanganan gugatan tidak maksimal	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Belum tersedianya JD/H bagian Hukum		RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya Anggaran untuk pembuatan aplikasi		Eksternal	C	Sulitnya masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan produk hukum daerah		RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya minat masyarakat memahami produk hukum daerah		Eksternal	C	Tidak optimalnya pelaksanaan produk hukum daerah	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Belum optimalnya pemahaman Aparatur terhadap pembentukan produk hukum daerah		RSO.22.99.02	Kepala Daerah / Setda	Kurang maksimalnya pemahaman aparatur		Eksternal	C	Terhambatnya pembentukan produk hukum daerah	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap	Risiko		Sebab ^(*)		C/UC	Dampak ^(**)		
				Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian		Sumber	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	Penyusunan	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Hukum	Banyaknya Kab/Kota Di Sumatera Barat Yang Juga melaksanakan Harmonisasi Terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	Eksternal	C	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Kepala Daerah, Setda
			Pembahasan	Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	ROO.22.99.02	Setda / Bagian Hukum	Kurang paham dalam membaca regulasi	Eksternal	C	Terlambatnya Produk Hukum Daerah untuk di fasilitasi	Kepala Daerah, Setda

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak ^{*)}	Skala Kemungkinan ^{*)}	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah				
1	Keterlambatan Pembentukan Produk hukum daerah	RSO.22.99.02	3	3	9
2	Banyaknya Gugatan yang masuk kepada Pemerintah Daerah	RSO.22.99.02	3	4	12
3	Belum tersedianya JDJH bagian Hukum	RSO.22.99.02	3	3	9
4	Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan produk hukum daerah	RSO.22.99.02	3	4	12
5	Belum optimalnya pemahaman Aparatur terhadap pembentukan produk hukum daerah	RSO.22.99.02	3	4	12
II	Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah				
1	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	ROO.22.99.02	4	3	12
2	Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	ROO.22.99.02	3	3	9

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						
1	Keterlambatan Pembentukan Produk hukum daerah	RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	Peraturan Perundang-Undangan yang masih berubah-ubah	Pembentukan Produk Hukum Daerah yang terhambat
2	Banyaknya Gugatan yang masuk kepada Pemerintah Daerah	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Belum optimalnya penanganan gugatan yang masuk kepada pemerintah daerah	Penanganan gugatan tidak maksimal
3	Belum tersedianya JDH bagian Hukum	RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya Anggaran untuk pembuatan aplikasi	Sulitnya masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah
4	Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan produk hukum daerah	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya minat masyarakat memahami produk hukum daerah	Tidak optimalnya pelaksanaan produk hukum daerah
5	Belum optimalnya pemahaman Aparatur terhadap pembentukan produk hukum daerah	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Kurang maksimalnya pemahaman aparatur	Terhambatnya pembentukan produk hukum daerah
Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah						
1	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Hukum	Banyaknya Kab/Kota Di Sumatera Barat Yang Juga melaksanakan Harmonisasi Terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi
2	Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	ROO.22.99.02	9	Setda / Bagian Hukum	Kurang paham dalam membaca regulasi	Terlambatnya Produk Hukum Daerah untuk di fasilitasi

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

: Kabupaten Lima Puluh Kota
 : 2023
 : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah							
1	Keterlambatan Pembentukan Produk hukum daerah	RSO.22.99.02	Pengecekan/penyocokkan Produk Hukum-Produk Hukum Terbaru	Keterlambatan Dalam pengecekan	Melaksanakan Pengecekan/penyocokkan Produk Hukum-Produk Hukum Terbaru	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023
2	Banyaknya Gugatan yang masuk kepada Pemerintah Daerah	RSO.22.99.02	Memfasilitasi Gugatan yang masuk	Kurang nya anggaran penanganan gugatan	Memilih gugatan yang lebih mendesak	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023
3	Belum tersedianya JDIH bagian Hukum	RSO.22.99.02	Optimalisasi Penggunaan JDIH Kabupaten	Tidak khusus milik bagian hukum	Optimalisasi Penggunaan JDIH Kabupaten	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2023
4	Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan produk hukum daerah	RSO.22.99.02	Optimalisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	Kurang nya Kepedulian masyarakat	Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	Sekretaris Daerah	Triwulan IV 2023
5	Belum optimalnya pemahaman Aparatur terhadap pembentukan produk hukum daerah	RSO.22.99.02	Optimalisasi pemahaman kepada Aparatur terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah	Memberikan bimbingan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah	Memberikan pemahaman kepada Aparatur terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah	Sekretaris Daerah	Triwulan IV 2023
II Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah							
1	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	ROO.22.99.02	Koordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Koordinasi yang dilaksanakan belum optimal	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Hukum	Triwulan I 2023
2	Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	ROO.22.99.02	Time skedul	Pengumpulan data tidak sesuai dengan time skedul	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Kepala Bagian Hukum	Triwulan I 2023

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

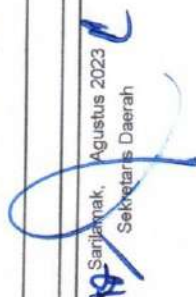

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melaksanakan Pengecekan/penyocokkan Produk Hukum-Produk Hukum Terbaru	Koordinasi Langsung/Media Elektronik	JDIH Nasional	Seluruh Unsur Pemerintahan/Masyarakat	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
2	Memilih gugatan yang lebih mendesak	Rapat / Koordinasi Langsung	Bag. Hukum	Yang Bersangkutan dengan Gugatan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
3	Optimalisasi Penggunaan JDIH Kabupaten	Koordinasi langsung	Hukum	Seluruh Unsur Pemerintahan/Masyarakat	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
4	Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	Rapat / Koordinasi langsung	Bag. Hukum	Seluruh Unsur Pemerintahan/Masyarakat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
5	Memberikan pemahaman kepada Aparatur terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah	Rapat / Koordinasi langsung	Bag. Hukum	Seluruh Unsur Pemerintahan/Masyarakat	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
6	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	Rapat / Koordinasi langsung	Bag. Hukum	OPD terkait	Triwulan I 2022	Triwulan I 2023	
7	Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	Rapat / Koordinasi langsung	Bag. Hukum	OPD terkait	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	



RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
a	b	c	d	e	f	g
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Melaksanakan Pengecekan/penyocokkan Produk Hukum-Produk Hukum Terbaru	Konfirmasi dan Koordinasi	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Hukum	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan
2	Memilih gugatan yang lebih mendesak	Konfirmasi, koordinasi dan laporan Pelaksanaan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Hukum	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Koordinasi telah dilaksanakan
3	Optimalisasi Penggunaan JDJH Kabupaten	Pelaksanaan Kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Hukum	Triwulan II 2023	Triwulan II 2022	telah dilaksanakan
4	Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	Konfirmasi dan Koordinasi	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Hukum	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	koordinasi telah dilaksanakan
5	Memberikan pemahaman kepada Aparatur terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah	Konfirmasi dan Koordinasi	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Hukum	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	koordinasi telah dilaksanakan
6	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Karwil Kemenkumham	Konfirmasi dan Koordinasi	Kepala Bag. Hukum	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan
7	Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	Konfirmasi dan Koordinasi	Kepala Bag. Hukum	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	koordinasi telah dilaksanakan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota		
Tahun Penilaian	2023		
Periode yang dinilai	2021-2026		
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026		
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas		
Sasaran Strategis	1	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	
IKU Renstra OPD	1	Indeks ABS-SBK	1,7
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis : Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>IKU Strategis : Indeks ABS-SBK</p>		
	<p>Sarihanak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah</p> 		
	<p>WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p> 		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2023	
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas	
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1 Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	
Informasi Lain	100%	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</p>	
	 Sarilamak, Agustus 2023 Sekretaris Daerah	 WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 196603 1 017

**Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Nama OPD : Bagian Kesta Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Periode yang dinilai : 2023 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indikator Kinerja		Risiko		Pemilik		Sebab		C/UC		Dampak		Pihak yang Terkena	
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Uraian	Uraian	Kode Risiko	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k					
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas														
	Sasaran : Meningkatnya fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Indek ABS-SBK	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Internal	C	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait					
			Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Internal	C	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait					
			Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	Internal	C	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait					
			Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat dan budaya	Internal	C	Tidak mencukupi jumlah SDM yang menguasai bidang adat dan budaya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait					
			Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSP.22.99.02	Kepala Daerah	Peranan penyelenggara terkait fungsi kelembagaan adat dan budaya yang masih kurang	Internal	C	Pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan adat dan budaya akan terkendala	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait					

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Kabupaten Lima Puluh Kota Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 Periode yang dinilai Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan										
Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum Penujang Urusan Pemerintah Daerah										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas Sasaran : Meningkatnya fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Program :									
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSO.22.99.02.01	Kepala Daerah / Setda	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Internal	C	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSO.22.99.02.02	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Internal	C	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSO.22.99.02.03	Kepala Daerah / Setda	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	Internal	C	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSO.22.99.02.04	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat dan budaya	Internal	C	Tidak mencukupi jumlah SDM yang menguasai bidang adat dan budaya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait
			Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSO.22.99.02.05	Kepala Daerah / Setda	Peranan penyelenggara terkait fungsi kelembagaan adat dan budaya yang masih kurang	Internal	C	Pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan adat dan budaya akan terkendala	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan a	Indikator Keluaran c	Tahap d	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
				Uraian e	Kode Risiko f	Pemilik g	Uraian h	Sumber i		Uraian k	Pihak yang Terkena l
1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya	Penyiapan regulasi	Keterlambatan penyelesaian perbup tentang pedoman penilaian Indeks ABS-SBK	ROO.22.99.02.01	Setda / Bagian Kesra	Keterlambatan memahami dan menyepakati indeks yang akan menjadi pedoman penilaian	Internal	C	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Kepala Daerah, Setda
			Pelaksanaan pengumpulan data	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02.02	Setda / Bagian Kesra	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Internal	C	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Setda
			Analisis data	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02.03	Setda / Bagian Kesra	Kurang paham tugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Internal	C	Keterlambatan penilaian Indeks ABS-SBK	Kepala Daerah, Setda

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak ⁽¹⁾	Skala Kemungkinan ^(*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSP.22.99.02	3	3	9
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSP.22.99.02	3	4	12
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSP.22.99.02	3	3	9
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSP.22.99.02	3	4	12
5	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSP.22.99.02	3	4	12
II Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah					
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSO.22.99.02	3	3	9
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSO.22.99.02	3	4	12
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSO.22.99.02	3	3	9
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSO.22.99.02	3	4	12
5	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSO.22.99.02	3	4	12
III Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah					
1	Keterlambatan penyelesaian perbup tentang pedoman penilaian Indeks ABS-SBK	ROO.22.99.02	4	3	12
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	3	3	9
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	3	3	9

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum

Urusan Pemerintahan

: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
Risiko Strategis						
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSP.22.99.02	9	Kepala Daerah	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSP.22.99.02	9	Kepala Daerah	Masih Kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat dan budaya	Tidak mencukupi jumlah SDM yang menguasai bidang adat dan budaya
5	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSP.22.99.02	12	Kepala Daerah	Peranan penyelenggara terkait fungsi kelembagaan adat dan budaya yang masih kurang	Pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan adat dan budaya akan terkendala
Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSO.22.99.02	9	Kepala Daerah / Setda	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat dan budaya	Tidak mencukupi jumlah SDM yang menguasai bidang adat dan budaya
5	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSO.22.99.02	12	Kepala Daerah / Setda	Peranan penyelenggara terkait fungsi kelembagaan adat dan budaya yang masih kurang	Pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan adat dan budaya akan terkendala
Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah						

1	Keterlambatan penyelesaian perbup tentang pedoman penilaian Indeks ABS-SBK	ROO.22.99.02	12	Setda / Bagian Kesra	Keterlambatan memahami dan menyepakati indeks yang akan menjadi pedoman penilaian	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	9	Setda / Bagian Kesra	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Terlambatnya pengolahan data
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	9	Setda / Bagian Kesra	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Keterlambatan penilaian Indeks ABS-SBK

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSP.22.99.02	Pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Pelatihan SDM tidak terlaksana	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Kepala daerah	Triwulan II 2023
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSP.22.99.02	Bantuan hibah untuk lembaga keagamaan	Tidak tersedia anggaran untuk hibah	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan	Kepala daerah	Triwulan I 2023
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSP.22.99.02	Pemberdayaan sosial ekonomi bekerjasama dengan BAZNAS	Program pemberdayaan sosial ekonomi tidak berjalan	Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	Kepala daerah	Triwulan I 2023
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSP.22.99.02	Pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Pelatihan SDM tidak terlaksana	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Kepala daerah	Triwulan II 2023
5	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSP.22.99.02	Optimalisasi peran lembaga adat dan budaya	Pembinaan kepada lembaga adat dan budaya tidak terlaksana	Melakukan pembinaan kelembagaan adat dan budaya	Kepala daerah	Triwulan II 2023
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSO.22.99.02	Pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Pelatihan SDM tidak terlaksana	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2023
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSO.22.99.02	Bantuan hibah untuk lembaga keagamaan	Tidak tersedia anggaran untuk hibah	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSO.22.99.02	Pemberdayaan sosial ekonomi bekerjasama dengan BAZNAS	Program pemberdayaan sosial ekonomi tidak berjalan	Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	Sekretaris Daerah	Triwulan I 2023
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSO.22.99.02	Pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Pelatihan SDM tidak terlaksana	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2023
5	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSO.22.99.02	Optimalisasi peran lembaga adat dan budaya	Pembinaan kepada lembaga adat dan budaya tidak terlaksana	Melakukan pembinaan kelembagaan adat dan budaya	Sekretaris Daerah	Triwulan II 2023
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah						

1	Keterlambatan penyelesaian perbup tentang pedoman penilaian Indeks ABS-SBK	ROO.22.99.02	Koordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait	Koordinasi yang dilaksanakan belum optimal	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Kepala Bagian Kesra	Triwulan II 2023
2	Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.22.99.02	Time skedul	Pengumpulan data tidak sesuai dengan time skedul	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Kepala Bagian Kesra	Triwulan III 2023
3	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.22.99.02	Penetapan indikator	Prosedur pengumpulan data tidak dijalankan	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup	Kepala Bagian Kesra	Triwulan IV 2023

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Penilaian : 2023

Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan

: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum

: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Rapat / Pelatihan	Bag. Kesra / DPMDN / Nagari	Nagari / Lembaga Keagamaan	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
2	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan	Rapat / Surat Edaran	Bag. Kesra	Nagari / Lembaga Keagamaan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
3	Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	Rapat / Surat Edaran / Koordinasi langsung	Bag. Kesra	BAZNAS / Nagari	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	
4	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Rapat / Pelatihan	Bag. Kesra / DPMDN / Nagari	Nagari / Kelembagaan adat dan budaya	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
5	Melakukan pembinaan kelembagaan adat dan budaya	Rapat / Surat Edaran / Koordinasi langsung	Bag. Kesra / DPMDN / Nagari	Nagari / Kelembagaan adat dan budaya	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
6	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Rapat / Koordinasi langsung	Bagian Kesra	OPD terkait / Nagari	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	
7	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Rapat / Koordinasi langsung	Bagian Kesra	Tim penilai Indeks ABS-SBK / Nagari	Triwulan III 2023	Triwulan IV 2023	
8	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup	Rapat / Koordinasi langsung	Bagian Kesra	Tim penilai Indeks ABS-SBK	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2023	

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 : Tervujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
a	b	c	d	e	f	g
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Kesra	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
2	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan	Laporan penyaluran dana hibah	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Kesra	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
3	Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	Konfirmasi, koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Kesra	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
4	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Kesra	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
5	Melakukan pembinaan kelembagaan adat dan budaya	Konfirmasi, koordinasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris Daerah / Kepala Bag. Kesra	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
6	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan	Kepala Bag. Kesra	Triwulan II 2023	Triwulan III 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
7	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bag. Kesra	Triwulan III 2023	-	Menunggu penetapan Perbup
8	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup	Konfirmasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bag. Kesra	Triwulan IV 2023	-	Menunggu penetapan Perbup

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Tervujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi Risiko Strategis Pemda	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal Kejadian	Sebab					
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
3	Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya	Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
4	Sumber Daya Manusia terkait dengan adat dan budaya masih kurang	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari adat dan budaya	Tidak mencukupi jumlah SDM yang menguasai bidang adat dan budaya	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang adat dan budaya	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
5	Belum optimal peran dan fungsi kelembagaan adat dan budaya	RSP.22.99.02	Tahun 2023	Peranan penyelenggara terkait fungsi kelembagaan adat dan budaya yang masih kurang	Pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan adat dan budaya akan terkendala	Melakukan pembinaan kelembagaan adat dan budaya	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis Sekretariat Daerah									
1	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	Triwulan II 2023	Triwulan II 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan
2	Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSO.22.99.02	Tahun 2023	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan	Triwulan I 2023	Triwulan I 2023	Monitoring dan koordinasi telah dilaksanakan

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No a	Tujuan/Sasaran Strategis/Program b	Indikator Kinerja c	Risiko		Pemilik f	Sebab		Sumber h	CIUC i	Dampak	
			Uraian d	Kode Risiko e		Uraian g	Uraian j			Pihak yang Terkena k	
1	<p>Tujuan Strategis : Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas</p> <p>Sasaran Strategis : Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerjasama, Pembangunan, dan Perekonomian</p>										
	Program :										
	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	Kurangnya kepatuhan SKPD untuk menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.	RSO 22.99.01	Kepala Daerah / Setda	Keterlambatan penyampaian Laporan RFK dari SKPD akan menyebabkan keterlambatan penginputan rekapitulasi Laporan RFK pada aplikasi pelaporan milik Biro Administrasi Pembangunan, yaitu Simbangda Based Evidence (SBE).	Internal	C		Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan hingga bulan Oktober 2022, hanya 72%.	Kepala Daerah, SKPD terkait
			Lambatnya respon SKPD dalam menyediakan data yang diminta yang menyebabkan keterlambatan input data, evaluasi data, dan pengambilan tindakan pengendalian.	RSO 22.99.01	Kepala Daerah / Setda	Berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pencapaian realisasi Program dan Kegiatan di atas 80%.	Internal	C		Masih sedikitnya SKPD yang merealisasikan Program dan Kegiatannya di atas 80%.	Kepala Daerah, SKPD terkait

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Berkualitas
 Sasaran strategis OP : Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Bidang Kerjasama, Pembangunan, dan Perekonomian
 Urusan Pemerintahah : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab ¹	C/UC	Uraian	Dampak ²
			Tahap	Uraian	Kode Risiko				
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	Penyusunan Regulasi	Tidak terpenuhinya tenggat waktu penyampaian laporan sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan lambatnya respon SKPD dalam menyiapkan data yang diminta Bagian Administrasi Pembangunan.	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan Setda	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubemur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda

Pelaksana dan Pengumpulan Data	Pengumpulan data realisasi fisik dan keuangan tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Terlambatnya pengolahan dan perekapan data	Internal	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda
Analisis Data	Kurangnya pemahaman Aparatur pelaksana pelaporan dan transfer ilmu yang tidak sempurna ketika terjadi pergantian Aparatur	RSO.22.99.01	Kepala Daerah / Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Internal	C	Keterlambatan penyampaian rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Administrasi Pembangunan	Kepala Daerah, Setda

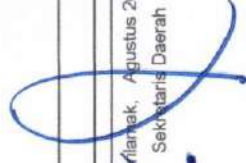


PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

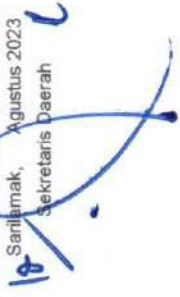

DOKUMEN PENILAIAN RISIKO DAN RTP
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2023

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Lima Puluh Kota	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
OPD yang Dinilai	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
Sumber Data	RENSTRA 2021-2026	
Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mewujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2 Mewujudkan ASN yang profesional dan bebas KKN 3 Mewujudkan fungsi pelayanan LPSE yang mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa 	
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2 Meningkatkan kapasitas dan manajemen ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 3 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tepat waktu 	
IKU Renstra OPD	1	Persentase pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku 90%
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2. Mewujudkan ASN yang profesional dan bebas KKN 3. Mewujudkan fungsi pelayanan LPSE yang mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2. Meningkatkan kapasitas dan manajemen ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tepat waktu <p>IKU Strategis : Persentase pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SPSE</p>	
	<p>Sarolang, Agustus 2023</p> <p>Sekretaris Daerah</p> <p></p> <p>WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017</p>	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai Sumber Data	Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 2023 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota RENSTRA 2021-2026
Tujuan Strategis	1 Mewujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
	2 Mewujudkan ASN yang profesional dan bebas KKN
	3 Mewujudkan fungsi pelayanan LPSE yang mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa
Program Sekretariat Daerah (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1 Program perekonomian dan pembangunan
Keluaran/Hasil Kegiatan	1 Persentase kegiatan terkait dengan pengadaan barang/jasa pada aplikasi SPSE 100%
Informasi Lain	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: 1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub. Kegiatan 1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 2. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
	 Sanjibam, Agustus 2023 Sekretaris Daerah  WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017

**Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Sumber		Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Mewujudkan ASN yang profesional dan bebas KKN Mewujudkan fungsi pelayanan LPSE yang mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Meningkatnya kapasitas dan manajemen ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tepat waktu 	Jumlah paket tender/seleksi/pengadaan langsung	Masih adanya peluang terjadinya permasalahan sengketa kontrak dan sengketa hukum pengadaan barang / jasa	RSP.22.33.02.01	Pelaku pengadaan (PA, PPK, PP, Pokja Pemilihan, Penyedia)	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan masyarakat atau terjadinya sengketa antara para pihak yang berkontrak Kegagalan kontrak dalam proses pengadaan Barang / Jasa 	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> Ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja Pemilihan, karena menghindari menjadi tersangka Keterlambatan dalam proses pengadaan Barang / Jasa 	PA
			Tidak tercapainya tujuan organisasi	RSP.22.33.02.02	PA, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Adanya Refocusing Anggaran	Internal	C	Kinerja PBJ menjadi kurang maksimal	Kepala UKPBJ
			Pelaksanaan pemilihan penyedia tidak tepat waktu	RSP.22.33.02.03	SKPD	Terbatasnya sumber daya manusia PBJ di Perangkat Daerah	Internal	C	Kinerja pengadaan barang / jasa menjadi kurang maksimal	PA, PPK

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota Nama OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian 2023 Periode yang dinilai 2023 Tujuan Strategis Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan : 1. Mewujudkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2. Mewujudkan ASN yang profesional dan bebas KKN 3. Mewujudkan fungsi pelayanan LPSE yang mempercepat proses Pengadaan Barang/Jasa Sasaran : 1. Meningkatnya pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 2. Meningkatnya kapasitas dan manajemen ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tepat waktu	Jumlah paket pekerjaan melalui metode pemilihan e-purchasing/pengadaan langsung/penunjukkan langsung/tender/seleksi melalui aplikasi SPSE	Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	RSO.22.33.02.01	Pelaku pengadaan (PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia)	Para pelaku pengadaan belum maksimal dalam memahami ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	Internal	C	Adanya risiko hukum terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa	PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP	

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis :
 Sasaran strategis OPD :
 Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	c Terkelolanya pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	d Perencanaan Pengadaan	e Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dalam tahun berjalan, sama dengan waktu pelaksanaan fisiknya	f ROO.22.33.02.01	g Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	h Belum maksimalnya Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan perencanaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku	j C	k 1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran	i PA, PPK, dan penyedia
			Perencanaan Pengadaan	Tidak tepat waktunya Perangkat Daerah dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	ROO.22.33.02.02	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran	PA, PPK, dan penyedia
			Perencanaan Pengadaan	Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	ROO.22.33.02.03	Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran	Pokja Pemilihan

			Peleaksanaan Kontrak	Tidak Terealisasi Kontrak	ROO.22.33.02.04	Pejabat Penandatangan Kontrak	Belum maksimalnya Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Pengendalian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	Internal	C	1. Tidak selesainya Barang/Jasa di akhir tahun anggaran 2. Menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari	PPK Kegiatan
			Perencanaan Pengadaan	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	ROO.22.33.02.05	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memahami penggunaan Produk Dalam Negeri	Internal	C	Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	PA, PPK, dan penyedia
			Perencanaan Pengadaan	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	ROO.22.33.02.06	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	Internal	C	Tidak maksimalnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang berasal dari APBD	PPK Kegiatan, pelaku UMKM
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada pelaku pengadaan	Perencanaan SDM	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan) yang WAJIB berasal dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhitung Tanggal 1 Januari 2021	ROO.22.33.02.07	Perangkat Daerah (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan)	Belum dimulainya proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PA, PPK, UKPBJ
			Perencanaan SDM	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak profesional dan handal dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.08	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk kebutuhan peningkatan kapasitas para pelaku pengadaan	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PA, PPK, Penyedia, PP, Pokja Pemilihan

				Pelaksanaan Pengadaan	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.09	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pokja Pemilihan)	Belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jurnal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PPK, PP, Pokja Pemilihan
				Pelaksanaan Pengadaan	Tidak terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.10	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pokja Pemilihan)	Belum maksimalnya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan "Klinik Pengadaan Barang/Jasa" yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari	PPK, PA, Pokja Pemilihan, PP
3	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya pelaksanaan pengadaan melalui aplikasi SPSE	Perencanaan Pengadaan	Tidak seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh SKPD pada aplikasi SIRUP	ROO.22.33.02.11	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Belum maksimalnya pemahaman dari Pengelola Sub Kegiatan terkait pentingnya pengumuman RUP di Aplikasi SIRUP dapat dilakukan sebelum DPA ditetapkan	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang tepat waktu 2. Kurangnya transparansi pengumuman belanja daerah kepada masyarakat luas	PA, PPK, Penyedia	
			Pemilihan Penyedia	Belum maksimalnya pelayanan administrasi secara elektronik kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	ROO.22.33.02.12	Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Masih belum representatifnya sarana dan prasana untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sumber	C	1. Tidak maksimalnya pelayanan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa 2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel belum sepenuhnya tercapai	PA, PPK, PP, Pokja Pemilihan, penyedia	

Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 :			
Urusan Pemerintahan		: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Masih adanya peluang terjadinya permasalahan sengketa kontrak dan sengketa hukum pengadaan barang / jasa	RSP.22.33.02.01	4	4	16
2	Tidak tercapainya tujuan organisasi	RSP.22.33.02.02	4	3	12
3	Pelaksanaan pemilihan penyedia tidak tepat waktu	RSP.22.33.02.03	4	3	12
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah				
1	Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	RSO.22.33.02.01	4	4	16
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah				
1	Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dalam tahun berjalan, sama dengan waktu pelaksanaan fisiknya	ROO.22.33.02.01	3	3	9
2	Tidak tepat waktunya Perangkat Daerah dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	ROO.22.33.02.02	2	3	6
3	Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	ROO.22.33.02.03	2	2	4
4	Tidak terlaksananya Pengendalian Kontrak	ROO.22.33.02.04	2	2	4
5	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	ROO.22.33.02.05	3	3	9
6	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	ROO.22.33.02.06	2	3	6
7	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan) yang WAJIB berasal dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhitung Tanggal 1 Januari 2021	ROO.22.33.02.07	3	3	9
8	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak profesional dan handal dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.08	2	4	8
9	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.09	2	2	4
10	Tidak terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.10	2	1	2
11	Tidak seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh SKPD pada aplikasi SIRUP	ROO.22.33.02.11	2	2	4
12	Belum maksimalnya pelayanan administrasi secara elektronik kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pegguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	ROO.22.33.02.12	2	3	6

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Risiko Prioritas		Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Urusan Pemerintahan		Risiko Prioritas		Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
No	a	b	c	d	e	f	g
	: Kabupaten Lima Puluh Kota : 2023 : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum : Penunjang Urusan						
I	Risiko Strategis Masih adanya peluang terjadinya permasalahan sengketa kontrak dan sengketa hukum pengadaan barang / jasa		RSP.22.33.02.01	16	Pejabat pengadaan (PA, PPK, PP, Pokja Pemilihan, Penyedia)	1. Pengadaan masyarakat atau terjadinya sengketa antara para pihak yang berkontrak 2. Kegagalan kontrak dalam proses pengadaan Barang / Jasa	1. Ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja Pemilihan, karena menghindari menjadi tersangka 2. Keterlambatan dalam proses pengadaan Barang / Jasa
	Tidak tercapainya tujuan organisasi		RSP.22.33.02.02	12	PA, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Adanya Refocusing Anggaran	Kinerja PBJ menjadi kurang maksimal
	Pelaksanaan pemilihan penyedia tidak tepat waktu		RSP.22.33.02.03	12	SKPD	Terbatasnya sumber daya manusia PBJ di Perangkat Daerah	Kinerja pengadaan barang / jasa menjadi kurang maksimal
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku		RSO.22.33.02.01	16	Pejabat pengadaan (PA, PPK, Pokja Pemilihan, PP, Penyedia)	Para pelaku pengadaan belum maksimal dalam memahami ketentuan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	Adanya risiko hukum terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dalam tahun berjalan, sama dengan waktu pelaksanaan fisiknya		ROO.22.33.02.01	9	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan perencanaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran
2	Tidak tepat waktunya Perangkat Daerah dalam menyusun, menetapkan dan mengemukakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.		ROO.22.33.02.02	6	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam menyusun, menetapkan dan mengemukakan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran
3	Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa		ROO.22.33.02.03	4	Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran

4	Tidak terlaksananya Pengendalian Kontrak	ROO.22.33.02.04	4	Pejabat Penandatanganan Kontrak	Belum maksimalnya Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Pengendalian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	1. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran 2. Menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari
5	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	ROO.22.33.02.05	9	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memahami penggunaan Produk Dalam Negeri	Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri
6	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	ROO.22.33.02.06	6	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	Tidak maksimalnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang berasal dari APBD
7	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan) yang WAJIB berasal dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhitung Tanggal 1 Januari 2021	ROO.22.33.02.07	9	Perangkat Daerah (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan)	Belum dimulainya proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari
8	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak profesional dan handal dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.08	8	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk kebutuhan peningkatan kapasitas para pelaku pengadaan	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari
9	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.09	4	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan)	Belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari
10	Tidak terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.22.33.02.10	2	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan)	Belum maksimalnya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan "Klinik Pengadaan Barang/Jasa" yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persoalan hukum dibelakang hari
11	Tidak seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh SKPD pada aplikasi SIRUP	ROO.22.33.02.11	4	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Belum maksimalnya pemahaman dari Pengelola Sub Kegiatan terkait pentingnya pengumuman RUP di Aplikasi SIRUP dapat dilakukan sebelum DPA ditetapkan	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang tepat waktu 2. Kurangnya transparansi pengumuman belanja daerah kepada masyarakat luas
12	Belum maksimalnya pelayanan administrasi secara elektronik kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	ROO.22.33.02.12	6	Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Masih belum representatifnya sarana dan prasarana untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Tidak maksimalnya pelayanan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa 2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel belum sepenuhnya tercapai

**Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda : Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Masih adanya peluang terjadinya permasalahan sengketa kontrak dan sengketa hukum pengadaan barang / jasa	RSP.22.33.02.01	Himbauan secara administratif kepada SKPD terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan berlaku	PA, PPK masih belum memahami secara maksimal terkait aturan pengadaan barang/jasa	1. Kerjasama dengan PPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 2. Membuat Perbup tentang Pengadaan Barang / Jasa yang dimulai dari Perencanaan PBJ sampai serah terima PBJ	Bagian PBJ, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah	Desember
	Tidak tercapainya tujuan organisasi	RSP.22.33.02.02	Telah terbentuk tim advokasi pengadaan barang/jasa	Belum sepenuhnya tim advokasi PBJ dimanfaatkan oleh SKPD	Dilakukan evaluasi pada tiap komponen kematangan UKPBJ	Biro PBJ	Desember
	Pelaksanaan pemilihan penyedia tidak tepat waktu	RSP.22.33.02.03	Sudah ada surat edaran dari Kepala Daerah terkait dengan percepatan pengadaan barang/jasa	Terlambatnya dari pengelola kegiatan (PPK) dalam mengeksekusi penyajian dokumen persiapan pengadaan barang/jasa	Dikeluarkan edaran percepatan PBJ	Bagian PBJ	Agustus
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah						
1	Tidak terlaksananya proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku		Sudah ada surat edaran dari Kepala Daerah terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku	SKPD belum memahami secara maksimal surat edaran terkait pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku	1. Dikeluarkan edaran terhadap pengadaan barang/jasa 2. Dilakukan pendampingan terhadap pengadaan barang/jasa	Inspektorat, Kepala SKPD, Bagian PBJ	Januari s.d Desember
III	Risiko Operasional OPD : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah						
1	Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dalam tahun berjalan, sama dengan waktu pelaksanaan fisiknya	ROO.22.33.02.01	Instruksi dari pimpinan daerah agar PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun Perencanaan dalam Tahun Berjalan	Instruksi dari pimpinan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun Perencanaan dalam Tahun Berjalan	1. Perangkat Daerah 2. Tim Anggaran Daerah	Triwulan I TA.2023

2	Tidak tepat waktunya Perangkat Daerah dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	ROO.22.33.02.02	Instruksi dari pimpinan daerah agar PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun, menetapkan dan mengumumkkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	Instruksi dari pimpinan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun, menetapkan dan mengumumkkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 2. Pengguna Anggaran (PA) dalam	Triwulan I TA 2023
3	Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	ROO.22.33.02.03	Instruksi dari pimpinan daerah agar PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tepat waktu	Instruksi dari pimpinan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tepat waktu	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Triwulan I dan paling lambat Triwulan II TA 2023
4	Tidak terlaksananya Pengendalian Kontrak	ROO.22.33.02.04	Instruksi dari pimpinan daerah agar PPK dan Pengelola Kegiatan untuk melakukan Pengendalian Kontrak dengan mempedomani peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku	Instruksi dari pimpinan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk melakukan Pengendalian Kontrak dengan mempedomani peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku	Pejabat Penandatanganan Kontrak	Waktu Pelaksanaan Kontrak
5	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	ROO.22.33.02.05	UKPBJ telah membuat Surat Edaran Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah agar memprioritaskan penggunaan Produksi Dalam Negeri	Surat Edaran Kepala Daerah belum terlaksana secara maksimal	Pengguna Anggaran dalam menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan penggunaan Produksi Dalam Negeri	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Mulai Maret 2023
6	Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	ROO.22.33.02.06	UKPBJ telah membuat Surat Keputusan pembentukan tim verifikasi katalog lokal	Saat ini tidak diperlukan tim verifikasi katalog lokal	Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun pemaketan pekerjaan agar memprioritaskan pemanfaatan katalog(nasional, sektoral, lokal)	Kepala UKPBJ dan Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Mulai Maret 2023
7	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan) yang WAJIB berasal dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhitung Tanggal 1 Januari 2021	ROO.22.33.02.07	UKPBJ telah melakukan perhitungan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk kebutuhan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan UKPBJ	Belum ada rekomendasi teknis kebutuhan jabatan fungsional dari intansi pembina (LKPP RI)	Masing-masing Perangkat Daerah dan UKPBJ segera melakukan perhitungan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk kebutuhan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan kerja masing-masing	1. BKPSDM 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 3. Bagian Organisasi 4. Perangkat Daerah	Paling Lambat Oktober 2023

8	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak profesional dan handal dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang yang berlaku	ROO.22.33.02.08	Membahas anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional untuk peningkatan kapasitas bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional untuk peningkatan kapasitas bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) belum representatif	Penganggaran kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional untuk peningkatan kapasitas bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	1. BKPSDM 2. Dinas PUPR 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 4. Perangkat Daerah	Setiap Tahun
9	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku	ROO.22.33.02.09	Pembahasan Dokumen Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku	Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan SOP	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku	1. Bagian Organisasi 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Triwulan TA 2023
10	Tidak terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku	ROO.22.33.02.10	Pembentukan "Klinik Pengadaan Barang/Jasa" yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pemanfaatan klinik Pengadaan Barang/Jasa yang masih belum optimal	Aktifnya Perangkat Daerah memanfaatkan UKPBJ sebagai sarana untuk pendampingan dan wahana konsultasi bagi para pelaku pengadaan	1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2. Perangkat Daerah	Setiap Tahun
11	Tidak seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh SKPD pada aplikasi SIRUP	ROO.22.33.02.11	Himbauan dari Pimpinan kepada Kepala OPD terkait percepatan pelaksanaan Pengumuman dan Penetapan RUP dalam Aplikasi SIRUP	Himbauan kepada kepala OPD belum terlaksana secara optimal	Tepat waktunya Perangkat Daerah mengumumkan RUP sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA/DPA	1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 2. Perangkat Daerah	Setiap Tahun
12	Belum maksimalnya pelayanan administrasi secara elektronik kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	ROO.22.33.02.12	Pelayanan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai	Sarana dan prasarana di bidang Pengadaan Barang/Jasa belum representatif	Terlayannya pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) yang efektif dan efisien dengan menggunakan media/sarana yang representatif	1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 3. Perangkat Daerah	Setiap Tahun

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum
Urusan Pemerintahan	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Kerjasama dengan PPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 2. Membuat Perbup tentang Pengadaan Barang / Jasa yang dimulai dari Perencanaan PBJ sampai serah terima PBJ	Rapat koordinasi atau konsultasi	Inspektoral, BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	UKPBJ	Triwulan IV 2023	Desember	
2	Dilakukan evaluasi pada tiap komponen kematangan UKPBJ	Rapat, FGD	Bagian PBJ, Inspektoral, Bagian Organisasi, BKPSDM	UKPBJ	Triwulan II 2023	April	
3	Dikeluarkan edaran percepatan PBJ	Surat Edaran	Bagian PBJ	SKPD	Triwulan I 2023	Januari	
4	1. Dikeluarkan edaran terhadap pengadaan barang/jasa 2. Dilakukan pendampingan terhadap pengadaan barang/jasa	Surat Edaran	Bagian PBJ	SKPD	Triwulan I 2023	Januari s.d Desember	
5	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun Perencanaan dalam Tahun Berjalan	Rapat Koordinasi dengan pengelola kegiatan	PA	PPK Kegiatan	Triwulan I 2023	Januari s.d Desember	
6	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	Rapat Koordinasi dengan pengelola kegiatan	PA	PPK Kegiatan	Triwulan I 2023	Januari s.d Maret	
7	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tepat waktu	Rapat Koordinasi dengan pengelola kegiatan	PA	PPK Kegiatan	Triwulan I 2023	Januari s.d Agustus	
8	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk melakukan Pengendalian Kontrak dengan memedomani peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku	Rapat Koordinasi dengan pengelola kegiatan	PA	PPK Kegiatan	Triwulan II 2023	April s.d Desember	
9	Pengguna Anggaran dalam menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan penggunaan Produksi Dalam Negeri	Surat Edaran	Tim P3DN, Inspektoral, Bagian PBJ	Pengguna Anggaran	Triwulan I 2023	Januari s.d Desember	
10	Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun pemakatan pekerjaan agar memprioritaskan pemanfaatan katalog(nasional, sektoral, lokal)	Surat Edaran	UKPBJ	SKPD	Triwulan I 2023	Januari s.d Desember	

11	Masing-masing Perangkat Daerah dan UKPBJ segera melakukan perhitungan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk kebutuhan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan kerja masing-masing	FGD	BKPSDM, Bagian Organisasi, UKPBJ	SKPD	Januari s.d Oktober
12	Penganggaran kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional untuk peningkatan kapasitas bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia)	Sosialisasi	LKPP	SKPD	Juli
13	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	SOP	Bagian Organisasi, UKPBJ	UKPBJ, SKPD	Januari s.d Desember
14	Aktifnya Perangkat Daerah memanfaatkan UKPBJ sebagai sarana untuk pendampingan dan wahana konsultasi bagi para pelaku pengadaan	Konsultasi dan pendampingan	UKPBJ	Pengelola Kegiatan di SKPD	Januari s.d Desember
15	Tepat waktunya Perangkat Daerah mengemukakan RUP sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA/DPA Kegiatan	Surat dan Aplikasi SIRUP	LPSE	PA, PPK di SKPD	Januari s.d Maret
16	Terlayannya pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) yang efektif dan efisien dengan menggunakan media/sarana yang representatif	Ruang Konsultasi (Klinik Pengadaan Barang/Jasa)	Bagian PBJ, Bagian Umum, TAPD	Bagian PBJ, SKPD	Januari s.d Desember